

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2020

**DARI UIN UNTUK DUNIA:
STUDI DIAGNOSTIK HAMBATAN KERJASAMA
INTERNASIONAL
DI TIGA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DI INDONESIA**



Tim Peneliti:

Atik Yuliyani, MA Tesol (Ketua)

Makyun Subuki, M.Hum (Anggota)

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN) LP2M
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2020**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v

BAB I : Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Riview Kajian Terdahulu	5
F. Hipotesis	7
G. Pendekatan dan Metode	8
H. Pembahasan.....	9
I. Jadwal dan Pelaksanaan Penelitian	9

BAB II : Kerja Sama Internasional Pemerintah Indonesia dan Kerjasama Internasional di bawah Kementerian Agama RI

A. Kerja Sama Internasional.....	11
1. Tinjauan Umum Kerjasama Internasional	11
2. Bentuk-Bentuk Kerjasama Internasional	13
3. Aktor-Aktor Kerjasama Internasional	15
B. Kerja Sama Internasional Pemerintah Indonesia	16
C. Kerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi di Indonesia	23
1. Kerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi di Kemenristek RI	26

2. Kerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi di Kemenag RI 28
3. Manfaat & Dampak Kerjasama Internasional Pendidikan Tinggi 30

BAB III : Kerja Sama Internasional di PTKIN

- A. Kerja Sama Internasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ... 31
- B. Kerja Sama Internasional di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta... 45
- C. Kerja Sama Internasional di UIN Wali Songo Semarang 57

BAB IV : Hambatan-Hambatan Kerja Sama Internasional di PTKIN

- A. Faktor-faktor Penghambat Kerja Sama Internasional..... 60
- B. Harapan dan Peluang Kerja Sama Internasional di PTKIN 63
- C. Kebijakan dan Langkah Strategis Meningkatkan Kerja Sama Internasional di PTKIN..... 66
- D. Hambatan dan Tantangan Kerja Sama Internasional di PTKIN
 1. Kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) 70
 2. Pendanaan dan *Support System* Kerjasama Internasional 72
 3. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Internasional 75

BAB V : Penutup

- A. Kesimpulan 77
- B. Rekomendasi..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan penelitian yang berjudul “**DARI UIN UNTUK DUNIA: STUDI DIAGNOSTIK HAMBATAN KERJASAMA INTERNASIONAL DI TIGA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DI INDONESIA**”, merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **Atik Yuliyani, MA Tesol**, dan telah memenuhi ketentuan dan kriteria penulisan laporan akhir penelitian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, September 2020
Peneliti,

Atik Yuliyani, MA Tesol
NIP.19840410 201503 2 003

Mengetahui:

Kepala Pusat,
Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN)
LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketua Lembaga,
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LP2M) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

DR. IMAM SUBCHI, MA.
NIP.19670810 200003 1 001

JAJANG JAHRONI, MA., Ph.D
NIP.19670612 199403 1 006

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atik Yuliyani

Jabatan : Dosen

Unit Kerja : FITK

Alamat : Jl. Bulak Raya No.146C rt.002/002 kel. Cempaka putih kec. Ciputat timur Tangerang Selatan

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul penelitian **“DARI UIN UNTUK DUNIA: STUDI DIAGNOSTIK HAMBATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DI TIGA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DI INDONESIA”** merupakan karya **orisinil saya**.
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laopran penelitian saya meruakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan sia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia untuk tidak mengajukan proposal penelitian kepada Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 2 tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, September 2020

Yang Menyatakan,

Atik Yuliyani, MA Tesol
NIP. 19840410 201503 2 003

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kondisi Indonesia akhir-akhir ini yang menunjukkan perubahan yang cukup baik dalam berbagai bidang akhirnya memunculkan optimisme, harapan dan tantangan yang lebih besar. Sehingga pada akhirnya beberapa pertanyaan pun bermunculan, diantaranya adalah sejauh mana Indonesia bisa membangun daya saing dalam kancah internasional di tengah berbagai perubahan yang terjadi? Maka untuk menjawab pertanyaan ini Indonesia mau atau tidak ditantang untuk menyiapkan, memproses dan menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas. Dalam konteks ini, perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di dalamnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang diantaranya adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Walisongo Semarang sudah semestinya mengambil peran strategis dalam menjalankan perannya di tingkat lingkaran internasional.

Oleh karena itu maka Universitas Islam Negeri (UIN) memiliki target masuk dalam 500 universitas terbaik di dunia (*World Class University*). Salah satu indikatornya adalah mendorong transformasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari universitas berbasis pengajaran (*teaching university*) menjadi universitas berbasis riset (*research university*). Status universitas berbasis riset ini penting dikejar guna mewujudkan UIN sebagai universitas dengan kontribusi keilmuan yang direkognisi masyarakat dunia.

Program untuk menuju universitas berkelas internasional ini sering disebut dengan *Internasionalisasi Perguruan Tinggi*. Internasionalisasi perguruan tinggi ini didefinisikan sebagai sebuah proses di perguruan tinggi yang mengintegrasikan komponen internasional ke dalam tujuan, fungsi atau penyampaian pendidikan (termasuk pengembangan kurikulum dan inovasinya; pertukaran dosen dan mahasiswa, pengembangan dan perluasan program studi; pemanfaatan bantuan teknologi untuk pembelajaran, pelatihan budaya, pendidikan untuk mahasiswa internasional; dan penelitian/publikasi bersama).

Levin, Jeong dan Ou (2006) membuat beberapa tolok ukur dari *World Class University* (WCU) tersebut, yakni (1) keunggulan penelitian (*excellence in research*), antara lain ditunjukkan dengan kualitas penelitian, yakni produktivitas dan kreativitas penelitian, publikasi hasil penelitian, banyaknya lembaga donor yang bersedia membantu penelitian, adanya hak patent, dan sejenisnya; (2) kebebasan akademik dan atmosfer kegembiraan intelektual; (3) pengelolaan diri yang kuat (*self-management*); (4) fasilitas dan pendanaan yang cukup memadai,

termasuk berkolaborasi dengan lembaga internasional; (5) keanekaragaman (diversity), antara lain kampus harus inklusif terhadap berbagai ranah sosial yang berbeda dari mahasiswa, termasuk keragaman ranah keilmuan; (6) internasionalisasi, misal program pertukaran mahasiswa, masuknya mahasiswa internasional atau asing, internasionalisasi kurikulum, koneksi internasional dengan lembaga lain (kampus dan perusahaan di seluruh dunia) untuk mendirikan program berkelas dunia; (7) kepemimpinan yang demokratis, yaitu dengan kompetisi terbuka antar-fakultas dan mahasiswa, juga kolaborasi dengan konstituen eksternal; (8) mahasiswa yang berbakat; (9) penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (10) kualitas pembelajaran dalam perkuliahan; (11) koneksi dengan masyarakat atau kebutuhan komunitas; dan kolaborasi internal kampus.

Di sisi lain THE (Times Higher Education) menentukan sejumlah indikator untuk melihat suatu perguruan tinggi termasuk kelas dunia (WCU), yang terdiri dari lima kategori (1) perkuliahan, terutama lingkungan belajarnya; (2) penelitian, volume, income dan reputasinya; (3) kutipan, imbas penelitian; (4) pemasukan industri, inovasi; dan (5) staf dan mahasiswa internasional. Atau QS (Quacquarelly Symonds) mengemukakan adanya 5 (lima) kriteria yang dapat digunakan untuk melihat suatu perguruan tinggi berkelas dunia atau sebaliknya, yakni: (1) academic peer review atau analisis dari komunitas elit akademik; (2) recruiter review; (3) faculty student ratio; (4) citation per faculty atau publikasi ilmiah per fakultas yang dikutip dalam skala internasional; dan (5) International orientation atau orientasi internasional. (Iskandar Agung., 2017)

Selanjutnya upaya yang dilakukan untuk mencapai universitas terbaik di dunia atau *World Class University* tersebut di antaranya adalah dengan mengembangkan kerjasama internasional dengan berbagai lembaga maupun perguruan tinggi di luar Indonesia. Hal ini tentunya dalam rangka menunjang peran UIN dalam memainkan perannya di dunia global. Keberadaan UIN di dunia internasional ini secara tidak langsung sudah meningkatkan daya saing Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan keagamaan sehingga cita-cita Indonesia dengan Islam Moderat-nya diharapkan akan menjadi pertimbangan dunia internasional.

Selama ini baik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Walisongo Semarang telah menjalin sejumlah kerjasama internasional dengan berbagai universitas maupun lembaga luar negeri. Kerjasama-kerjasama tersebut dimanfaatkan secara baik untuk memperkenalkan UIN ke dunia internasional. Hal ini sudah terlihat dengan beberapa kegiatan berkala internasional yang diikuti dalam berbagai bidang, di samping upaya meningkatkan kerjasama internasional ini terus dilakukan.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta misalnya sampai tahun 2019 ini sudah memiliki setidaknya sebanyak 170 orang mahasiswa asing yang berasal lebih

dari 10 negara di berbagai benua. Jumlah ini masih jauh dari total jumlah mahasiswa asing yang direncanakan, apalagi kalau dibandingkan dengan beberapa kampus lain seperti UGM, UI dan USU yang menempati 3 posisi teratas perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa asing paling banyak pada tahun 2016. (Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Dikti, 2016) Untuk itu Rektor UIN Jakarta, Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Lubis MA dalam rapat pimpinan pada tanggal 16 Januari 2019, meminta Universitas meningkatkan keberadaan mahasiswa asing yang belajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU), keberadaan mahasiswa asing yang belajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi kontribusi perguruan tinggi ini dalam membantu masyarakat dunia maupun komunitas muslim berbagai negara. Selain peningkatan publikasi karya ilmiah, keberadaan mahasiswa asing merupakan indikator kinerja yang membuktikan keberhasilan pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lainnya, keberadaan mahasiswa asing dari berbagai negara yang belajar di UIN Jakarta merupakan bukti penting kontribusi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam membangun kehidupan umat manusia, terutama komunitas Muslim dunia (<https://uinjkt.ac.id/2016>).

Maka secara umum faktor tersebut di atas setidaknya menjadi sangat penting dalam mewujudkan suatu perguruan tinggi menjadi peringkat *World Class University* (WCU). Sementara itu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selalu dituntut untuk mencapai *World Class University*, akan tetapi komponen-komponen untuk mencapai hal tersebut seperti kerjasama internasional selama ini terhambat oleh beberapa faktor seperti:

1. Kerjasama internasional yang selama ini hanya terbatas pada penandatanganan MoU saja;
2. Implementasi dari sebuah kerjasama adalah perguruan tinggi harus memiliki cadangan dan perencanaan dana serta *support system* yang baik;
3. Perencanaan dan Penganggaran untuk kerjasama internasional masih minim.

Sehingga pertanyaannya adalah seberapa besar faktor yang diasumsikan tersebut benar? Berdasarkan hal tersebut maka Peneliti bermaksud melakukan penelitian diagnostik terhadap hambatan kerjasama internasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Walisongo Semarang. Kedua universitas ini merupakan bagian dari lembaga PTKIN dan memiliki perkembangan yang berbeda dan dinamis jika dibandingkan dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

B. Permasalahan Penelitian

1. *Kerjasama Internasional terbatas pada MoU*

Penelitian ini berfokus pada beberapa masalah utama di tingkat universitas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Walisongo Semarang yang dinilai belum optimal. Hal itu dapat dilihat dari kerjasama internasional yang selama ini dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta misalnya. Berdasarkan pada data yang dimiliki oleh Pusat Layanan Kerjasama Internasional (PLKI) ada sebanyak 55 Kerjasama Internasional dari tahun 2014-2019 berupa MoU yang telah dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Akan tetapi kebanyakan dari kerjasama tersebut hanya terbatas pada MoU saja, hanya sedikit yang berlanjut pada program konkret sebagai implementasi dari MoU tersebut.

Bahkan ada MoU yang sudah hampir habis masa berlakunya, tetapi tidak kunjung ada program keberlanjutan dari MoU tersebut. Padahal begitu banyak potensi yang bisa digali dari semua kerjasama yang telah dijalin itu untuk meningkatkan kualitas UIN dalam rangka mencapai *World Class University*.

2. *Implementasi dari sebuah kerjasama adalah perguruan tinggi harus memiliki cadangan dana dan support system yang baik*

Tidak berjalannya program dari kerjasama yang sudah dilakukan berupa MoU tersebut tidak lain disebabkan adalah karena minimnya cadangan dana dan *support system* yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Ketiadaan dana selama ini menjadi alasan yang paling dominan sehingga membuat kerjasama yang telah dilakukan tidak terimplementasikan dengan baik bahkan sampai pada masa MoU tersebut tidak berlaku lagi. Selain itu *support system* dari kelembagaan maupun SDM yang dimiliki oleh universitas menjadi faktor berikutnya.

Penelitian ini nantinya berupaya menggali dan mempertanyakan bagaimana cadangan dana dan *support system* ini seharusnya tidak lagi menjadi alasan tidak terimplementasikannya sebuah kerjasama internasional yang telah dilakukan.

3. *Perencanaan dan Penganggaran untuk kerjasama internasional masih minim*

Selama ini pada umumnya di setiap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) perencanaan dan penganggaran untuk kerjasama internasional masih jauh dari harapan dalam rangka *World Class University*. Sehingga dampaknya adalah banyak kerjasama yang tidak berjalan disebabkan ketiadaan mata anggaran untuk kegiatan tersebut. Akhirnya beberapa

kerjasama terpaksa tidur untuk waktu yang cukup lama sampai dianggarkan dalam perencanaan dan penganggaran UIN.

Beberapa permasalahan dalam penelitian ini nantinya akan disederhakan ke dalam bentuk pertanyaan penelitian yang tentunya akan dibahas dalam penelitian lebih lanjut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka beberapa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang selama ini dianggap sebagai hambatan kerjasama internasional?
2. Apa harapan dan bagaimana peluang Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk meningkatkan kerjasama internasional?
3. Jika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) ingin meningkatkan kerjasama internasional kebijakan dan langkah-langkah strategis apa yang harus ditempuh?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk dijadikan sebagai pijakan dasar bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka mendukung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi *World Class University*.

E. Review Kajian Terdahulu

Diagnostik Studi dalam literatur ilmiah adalah penelitian dengan mengkaji permasalahan tentang objek studi dalam rangka menemukan sebuah *problem solving* (Didin Syafrudin dkk., 2017). Aziz Khan dkk (1997) menjelaskan bahwa hasil Studi diagnostik memiliki kedudukan yang cukup strategis, terutama bila dikaitkan dengan peluang keberhasilan program penelitian terkait hambatan kerjasama internasional di PTKI. Studi Diagnostik sendiri sudah beberapa kali dijadikan acuan dalam beberapa penelitian untuk mengukur suatu program sebagaimana telah diuraikan pada review kajian terdahulu.

World Class University (WCU) atau internasionalisasi perguruan tinggi juga kerap didefinisikan pada penilaian, perankingan, dan pengakuan yang berskala internasional pada universitas atau kampus di berbagai negara. Studi Levin, Jeong dan Ou (2006) menyebut beberapa tolok ukur skala pengakuan internasional world class university sebagai berikut :

1. Keunggulan penelitian (*excellence in research*), antara lain ditunjukkan dengan kualitas penelitian, produktivitas dan kreativitas penelitian, publikasi hasil penelitian, banyaknya lembaga donor yang bersedia membantu penelitian, adanya hak paten, dan sejenisnya;
2. Kebebasan akademik dan atmosfer kegembiraan intelektual;
3. Pengelolaan diri yang kuat (*self-management*);
4. Fasilitas dan pendanaan yang cukup memadai, termasuk berkolaborasi dengan lembaga internasional;
5. Keanekaragaman (*diversity*), antara lain kampus harus inklusif terhadap berbagai ranah sosial yang berbeda dari mahasiswa, termasuk keragaman ranah keilmuan;
6. Internasionalisasi, misal internasionalisasi program dengan meningkatkan pertukaran mahasiswa, masuknya mahasiswa internasional atau asing, internasionalisasi kurikulum, koneksi internasional dengan lembaga lain (kampus dan perusahaan di seluruh dunia) untuk mendirikan program berkelas dunia;
7. Kepemimpinan yang demokratis, yaitu dengan kompetisi terbuka antar-dosen dan mahasiswa, juga kolaborasi dengan konstituen eksternal;
8. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
9. Kualitas pembelajaran dalam perkuliahan;
10. Koneksi dengan masyarakat atau kebutuhan komunitas;
11. Kolaborasi internal kampus.

Dengan beberapa tolok ukur itu kita mulai bisa menangkap apa yang dimaksud dengan kampus berkelas internasional, yakni kampus-kampus yang menempati peringkat besar dalam pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga dengan reputasi internasional. Beberapa lembaga pemeringkatan yang dikenal perguruan tinggi di Indonesia misalnya Times Higher Education Supplement (THES), Webometrics, dan Shanghai Jiao Tong University (SJTU). (<https://diktis.kemendikbud.go.id/2015>)

Peringkat atau ranking inilah yang agaknya dimaksud oleh pihak kampus serta mereka yang sepakat dengan gagasan world class university di Indonesia sekarang ini. Dapat kita lihat betapa gegap gempitanya ketika beberapa kampus di Indonesia naik peringkat dalam pemeringkatan kampus ala THES misalnya. Dengan kata lain, kalau kampus-kampus di Indonesia ingin menjadi

universitas berkelas dunia, semua resources kampus tersebut sedang diupayakan untuk naik kelas dalam pemeringkatan THES, Webometrics, dan sejenisnya.

F. Hipotesis

Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa perguruan tinggi di Indonesia khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam belum memiliki perhatian yang cukup serius terhadap kerjasama internasional yang merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kualitas suatu perguruan tinggi. Hal yang sama juga terjadi di UIN Jakarta, UIN Yogyakarta dan UIN Semarang, dimana jumlah kerjasama masih jauh dari target yang ditetapkan untuk menuju *World Class University*.

Untuk itu penelitian ini menyederhanakan asumsi dasar tersebut yang kemudian diharapkan menjadi fokus studi diagnostik ini, yaitu :

- 1. Kerjasama dalam bentuk MoU.** Kerjasama selama ini identik dilakukan dengan pendatanganan MoU, baik kerjasama nasional maupun kerjasama internasional. Akan tetapi kerjasama bukanlah sekedar penandatanganan MoU semata, melainkan harus diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilakukan dengan mitra kerjasama. MoU adalah langkah awal, sedangkan implementasinya adalah program yang disepakati dalam MoU tersebut. Maka diharapkan MoU yang selama ini sudah berjalan maupun yang akan berjalan harus dikoneksikan ke dalam kegiatan dan program yang dilakukan dengan mitra guna kemajuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- 2. Pendanaan dan Support System Kerjasama Internasional.** Pendanaan dan *support system* adalah faktor yang paling utama sebenarnya dalam sebuah kerjasama sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Perguruan tinggi dan mitra yang melakukan sebuah kerjasama harus menyiapkan pendanaan dan *support system* yang memadai untuk kerjasama tersebut agar bisa diimplementasikan dengan baik. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pendanaan dan support system terhadap kerjasama internasional, mulai dari regulasi, anggaran dan pelaksanaannya, mengapa pendanaan untuk kerjasama internasional tidak mudah didapatkan dan bagaimana program UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menghadapi kerjasama internasional yang akan dilakukan berikutnya.
- 3. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Internasional.** Penelitian ini ingin mendalami sejauh mana monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap kerjasama internasional selama ini dan apa saja tantangannya. Banyak kerjasama internasional yang selama ini tidak berjalan efektif dikarenakan salah satunya adalah kurangnya monitoring dan evaluasi secara serius.

G. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi diagnostik tentang hambatan riset di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Semarang serta UIN Walisongo Semarang dan mengambil contoh dari kajian serupa di tiga perguruan tinggi lain yang pernah menerapkan studi diagnostik, yaitu Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia dan Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta.

Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Data dalam penelitian ini akan diambil secara kuantitatif melalui kuesioner yang akan disebarluaskan kepada informan secara online yang terdiri dari pimpinan universitas (rektorat dan biro), pimpinan lembaga dan pusat, pimpinan fakultas, guru besar, dosen dan peneliti, serta mahasiswa asing di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Semarang dan UIN Walisongo Semarang. Total narasumber dan responden sebanyak 50 orang.

Dalam rencana semula, kuesioner akan dibagikan kepada responden dan wawancara akan dilakukan di lapangan. Namun, menyusul adanya wabah COVID-19 yang merebak di Indonesia sejak Maret 2020 hingga sekarang, maka banyak sekali kendala yang dihadapi para peneliti. Di antaranya, penelitian tidak dapat dilakukan dengan segera karena harus menunggu situasi dan kondisi yang lebih kondusif.

Namun karena adanya berbagai dorongan dan juga inovasi yang tersedia selama masa pandemi COVID-19 ini, maka telah disepakati bahwa para peneliti menyusun kuesioner secara online. Hanya saja, ternyata tidak mudah mendapatkan data secara cepat dan utuh. Para responden banyak yang meminta waktu perpanjangan atau bahkan tidak merespon terhadap permintaan mengisi kuesioner secara online. Ini merupakan salah satu kendala utama yang kami hadapi.

Kendala lainnya adalah adanya aturan pembatasan perjalanan PSBB yang diberlakukan selama masa pandemi. Andaiapun bisa dilakukan perjalanan untuk penelitian maka melakukan wawancara langsung, komunikasipun harus dibatasi karena terkait peraturan jaga jarak (atau Physical Distancing) yang diterapkan pemerintah. Namun para peneliti tidak pernah patah semangat dan terus mencoba melakukan hal terbaik agar data-data di lapangan bisa didapatkan.

Sementara untuk beberapa tokoh kunci dalam bidang kerjasama internasional dan peningkatan jumlah mahasiswa asing akan dilakukan wawancara mendalam guna mendapatkan gambaran yang utuh tentang apa dan bagaimana masalah dan tantangan yang dihadapi UIN terkait kedua isu strategis ini.

H. Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab seperti berikut ini :

Bab Pertama: Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Review Kajian Terdahulu, Hipotesis, Pendekatan dan Metodologi Penelitian, Rencana Pembahasan dan Jadwal Penelitian.

Bab Kedua: Kerjasama Internasional Pemerintah Indonesia dan Kerjasama Internasional di bawah Kementerian Agama, yang terdiri dari Regulasi Kerjasama Internasional oleh pemerintah Indonesia, kerjasama internasional di lingkungan Kemenristek RI, Kemenag RI, dan Manfaat serta dampak Kerjasama Internasional bagi pemerintah Indonesia .

Bab Ketiga: Kerjasama Internasional di PTKIN, yang terdiri dari Kerjasama Internasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kerjasama Internasional di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Kerjasama Internasional di UIN Walisongo Semarang.

Bab Keempat: Hambatan-hambatan Kerjasama Internasional di PTKIN, yang terdiri dari Keterbatasan Kerjasama Internasional hanya pada penandatanganan MoU, Pendanaan dan *Support System* Kerjasama Internasional dan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Internasional.

Bab Kelima: Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Rekomendasi.

I. Jadwal dan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan selama 3 bulan dari awal Juli 2020 sampai akhir September 2020 dengan agenda penelitian sebagai berikut :

Bulan	Minggu ke	Agenda
Juli 2020	I	Revisi Proposal Penelitian
	II	Workshop Desain Penelitian
	III	Penyusunan Instrumen penelitian (daftar wawancara dan kuesioner)
	IV	Penyusunan borang wawancara dan kuesioner (online)

Agustus 2020	I	Penelitian Lapangan : Wawancara dan Kuesioner
	II	
	III	Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisis data
	IV	Penyusunan Draft I Laporan Penelitian
September 2020	I	Workshop Temuan Penelitian
	II	Penyusunan Draft II Laporan Penelitian
	III	Finalisasi dan editing draft Laporan Penelitian
	IV	

BAB II

Kerja Sama Internasional Pemerintah Indonesia dan Kerjasama Internasional di bawah Kementerian Agama RI

A. Kerja Sama Internasional

1. Tinjauan Umum Kerjasama Internasional

Mengingat dengan meningkatnya intensitas hubungan serta ketergantungan sesuai kebutuhan antar negara saat ini, maka untuk memudahkan menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan teori kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan hubungan antar bangsa yang memiliki tujuan berlandaskan kepentingan nasional (Injaya, 2013: 9). Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Dalam pelaksanaannya, kerjasama internasional bisa meliputi bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi. (Bagaskara, 2018: 368).

Menurut Kalevi Holsti (Agita Suryadi, 2015: 3) kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus;
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya;
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih, dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan;
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan; dan
5. Transaksi antar negara dilakukan untuk memenuhi tujuan mereka.

Menurut Dougherty, kerjasama Internasional adalah kerjasama digambarkan sebagai suatu perangkat hubungan yang tidak didasarkan pada paksaan atau tekanan dan itu disahkan oleh persetujuan yang timbal balik

oleh negara-negara anggota boleh mengembangkan hubungan secara kerjasama sebagai hasil keanggotaan mereka didalam organisasi internasional. Di dalamnya memasukkan unsur seperti persetujuan aturan, peraturan, norma-norma, dan prosedur pengambilan keputusan, di mana negara mencari sesuatu dalam rangka memecahkan isu. (Vionita Rondonuwu, 2015: 3). Menurut Milner, konsep kerjasama sendiri mencakup dua elemen penting. *Pertama*, mengasumsikan bahwa setiap perilaku para aktor diarahkan oleh beberapa tujuan, yang setiap tujuannya tidak perlu untuk memiliki tujuan yang sama dengan aktor terkait lainnya. Namun pada intinya adalah mereka memiliki asumsi perilaku rasional dengan cara mereka sendiri. Kedua, definisi kerjasama sama telah diterapkan bahwa kerja sama telah menyediakan *gains* atau *rewards* bagi para aktornya. *Gains* yang dimaksud tidaklah harus sama besar atau baik bagi masing-masing negara, tetapi yang terpenting saling menguntungkan. Setiap aktor membantu yang lainnya untuk mewujudkan tujuan mereka dengan melakukan berbagai penyesuaian kebijakan untuk mengantisipasi *rewards* sendiri (Althea Sri Bestari, 2020: 18). Meskipun demikian, masing-masing aktor tidak selalu membantu yang lain, karena itu adalah antisipasi untuk memperbaiki situasi sendiri yang mengarah kepada penyesuaian kebijakan.

Hubungan dan kerjasama internasional muncul sebagai akibat dari kondisi sosial politik dan ekonomi di mana keadaan dan kebutuhan masing-masing negara itu berbeda-beda, sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki juga tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhan yang ada di negara lain. Adapun faktor yang mendorong terjadinya kerjasama internasional, diantaranya (Starlet Rallysa Injaya, 2011: 9):

1. Untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri;
2. Meningkatkan perekonomian negara;
3. Meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat;
4. Memperluas lapangan pekerjaan;
5. Meningkatkan pendapatan negara dengan kegiatan ekspor;
6. Memperkuat hubungan persahabatan dengan negara lain.

Dalam menjalin kerjasama internasional, biasanya terdiri dari seperangkat aturan, prinsip-prinsip, norma, dan prosedur pembuatan yang mengatur jalannya rezim internasional. Selain itu, negara-negara yang melakukan kerjasama internasional tentu memiliki tujuan bersama atau kepentingan bersama. Sebab ketidakberadaan kepentingan bersama di dalam kerjasama, merupakan suatu hal yang mustahil. Menurut Thomas

Bernauer, yang dikutip oleh Injaya, kerjasama internasional akan cenderung mengubah sikap negara sesuai dengan kesepakatan yang diambil dalam institusi kerjasama tersebut. Kemudian para aktor akan memfokuskan masalah apa yang akan mereka hadapi dan merencanakan skema penyelesaian masalah yang dianggap paling efektif. (Starlet Rallysa Injaya, 2011: 9).

Kerjasama internasional dilakukan sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama, yaitu (Zulkifli, 2012: 20):

1. Adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan, tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula.
2. Adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari pada komitmen.

2. Bentuk-Bentuk Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional, jika ditinjau dari pengaturan substansinya, dapat dibedakan menjadi dua kategori berupa *law making treaties*, yaitu perjanjian internasional yang mengandung kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa, sehingga dengan demikian dapat dikategorikan sebagai perjanjian-perjanjian internasional yang berfungsi sebagai sumber langsung hukum internasional. (Zulkifli, 2012: 17). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Kemudian ada juga perjanjian internasional yang digolongkan sebagai *treaty contracts* yang mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak yang mengadakannya saja, sehingga hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian. (Zulkifli, 2012: 17-18) Hingga saat ini, kerjasama internasional yang dilakukan oleh suatu negara dirumuskan dalam bentuk perjanjian. Setiap perjanjian internasional yang dilaksanakan akan mengikat suatu negara yang menyatakan terikat ke dalamnya melalui suatu peraturan perundang-undangan nasional.

Kemudian apabila ditinjau berdasarkan jumlah peserta yang terlibat, kerjasama internasional dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. *Kerjasama bilateral*

Pada proses kerjasama bilateral, pihak yang terlibat pada kerjasama internasional tersebut hanya melibatkan dua negara. Kerjasama bilateral seringkali ditandai dengan adanya kepercayaan normatif antara pembuat kebijakan dari kedua negara. Dalam kerjasama bilateral kedua negara bekerja untuk menuju pada tujuan bersama. Kerjasama bilateral diperlukan mengingat kedua negara yang saling terlibat menyadari adanya ketidakseimbangan akan sumber daya yang dapat dikerahkan untuk mencapai masing-masing kepentingannya. (Setyasih Harini, 2015: 589)

2. *Kerjasama multilateral*

Berbeda dengan kerjasama bilateral, kerjasama multilateral biasanya dilakukan oleh lebih dari dua negara yang tidak dibatasi oleh wilayah atau kawasan tertentu, serta bersifat internasional. Dalam kerjasama internasional, biasanya negara-negara maju memiliki kekuatan langsung dibandingkan dengan negara-negara kecil. Misalnya negara-negara yang tergabung di PBB.

3. *Kerjasama regional*

Kerjasama regional merupakan kerjasama antar negara yang berada atau terletak pada satu kawasan tertentu. Jika ditinjau dari segi praktis, kerjasama regional merupakan cara dalam menghadapi globalisasi. Misalnya, negara-negara yang ada di ASEAN bekerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian apabila ditinjau dari segi teoritis, kerjasama regional merupakan penyusunan kekuatan bersama dalam menjaga stabilitas regional dan menghadapi dinamika global. Melalui perspektif fungsionalisme David Mitrany, sebagaimana dikutip oleh Soni Akhmad Nulhaqim. dkk, membahas integrasi regional berasal dari fungsi-fungsi yang ada dan terus berakumulasi sehingga menjadi kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya. (Soni Akhmad Nulhaqim dkk, 2015: 202)

Berdasarkan pada sifatnya, kerjasama internasional dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu (Smith Michael, 1990: 222) :

1. Konsensus

Konsensus merupakan tingkatan kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakpercayaan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara yang terlibat

2. Kolaborasi

Kolaborasi merupakan suatu tingkatan kerjasama yang lebih tinggi dari sebelumnya, serta ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.

3. Integrasi

Integrasi merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam kerjasama integrasi, jarang sekali terjadinya benturan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat.

3. Aktor-Aktor Kerjasama Internasional

Sebuah kerjasama, tentu erat kaitannya dengan aktor yang melakukan kerjasama. Aktor menunjuk pada pelaku dalam interaksi internasional. Di era saat ini, aktor kerjasama internasional dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua). *Pertama*, aktor negara, untuk aktor negara, lazimnya merupakan negara berdaulat yang dibangun oleh kesadaran kebangsaan. Oleh karena itu, aktor ini disebut juga negara-bangsa. Aktor negara ini berbeda-beda secara sistem politiknya. Pada umumnya, mereka mengarah kepada negara demokratis, dimana politik pemerintahnya merupakan representasi dari kemauan rakyatnya. Akan tetapi, banyak juga negara yang dikuasai elit pemerintah dan pengusaha, sehingga seolah lepas dari gambaran warga negaranya. Sistem politik dalam negeri ini berpengaruh kuat terhadap karakteristik hubungan internasional. (Margono, 2015: 106).

Kedua, aktor yang menyangkut non-negara atau disebut aktor nonpemerintah. Untuk aktor non negara ini lebih banyak merupakan perusahaan multinasional atau *multy national corporations* (MNC). *Multy national corporations* (MNC) merupakan perusahaan multi nasional yang bergerak hampir di seluruh negara di dunia. Misalnya, perusahaan Cola-Cola. Perusahaan tersebut memiliki kantor pusat di negara Amerika Serikat, namun untuk kantor cabang, pabrik, dan jaringan pemasarannya berada di berbagai negara. (Margono, 2015: 106-107)

Selain perusahaan multinasional yang menjadi aktor non pemerintah pada kerjasama internasional, terdapat organisasi pemerintahan internasional atau *international governmental organizations* (IGO). Untuk organisasi ini, contohnya adalah PBB, ASEAN, WTO, dan sejenisnya. Mereka merupakan aktor tradisional di era hubungan kerjasama internasional di era saat ini. Aktor-aktor tersebut sering dipercaya sebagai wadah untuk mencapai keadilan dan

kemajuan ekonomi secara global. Namun tidak jarang, aktor-aktor tersebut tidak bisa menjalankan fungsi yang sebagaimana mestinya. (Margono, 2015: 106-107)

Aktor non pemerintah lain yang menjalankan kerjasama internasional adalah organisasi nonpemerintah internasional (*International Non-Governmental Organization/INGO*). Organisasi tersebut merupakan organisasi non profit berskala internasional yang biasanya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan hidup. *Transparency International* misalnya, memperjuangkan aspirasi antikorupsi sehingga tercipta keadilan. Kemudian ada Palang Merah Internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan ke berbagai negara untuk menolong korban perang, bencana alam, dan penyakit endemik. (Margono, 2015: 107)

Terakhir, untuk lembaga non pemerintah yang terlibat pada kerjasama internasional yaitu *transnational organized crime* (TOC). Organisasi ini merupakan kelompok kejahatan internasional yang terorganisir. Kelompok ini terlibat pada hubungan kerjasama internasional karena pengaruhnya yang signifikan terhadap interaksi antar negara. Kerja sama antar negara digalang untuk mengatasi peredaran narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia, dan senjata gelap. Bahkan belakangan ini, dunia dikejutkan dengan apa yang disebut Amerika Serikat sebagai teroris internasional. (Margono, 2015: 107)

Dewasa ini, pada pelaksanaannya kerjasama antara aktor negara dan non negara sering terjadi. Hal ini disebabkan baik negara maupun organisasi non negara sama-sama saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang sama, dan dengan adanya institusi atau organisasi maka dapat mengurangi biaya dan menyediakan informasi dalam kerjasama. (Margono, 2015: 108) Kemudian Robert O. Keohane dan Robert Axelrod menyebutkan bahwa keberhasilan kerjasama menyangkut masalah kesamaan (mutalitas) kepentingan, jumlah aktor yang terlibat, serta bayangan masa depan (*shadow of the future*). Lebih lanjut, dalam bayangan masa depan mencakup empat faktor, yaitu jangka waktu masa depan, keteraturan situasi, adanya informasi tentang tindakan aktor-aktor lain, dan umpan balik yang cepat dalam suatu kerjasama. (Annaas Maulana Bagaskara: 369)

B. Kerja Sama Internasional Pemerintah Indonesia

Sebagai salah satu negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kepentingan bagi negaranya. Salah satu kepentingan negara Indonesia adalah meningkatkan pendapatan hidup, memperluas lowongan pekerjaan, serta meningkatkan daya saing di kancah internasional, dan mencerdaskan anak bangsa. Untuk menjalankan kepentingan tersebut, pemerintah Indonesia melalui kementerian, mendorong kerjasama internasional di berbagai instansi pemerintahan dengan negara lain.

Menurut Koesnadi Kartasasmita, sebagaimana dikutip oleh Agita Suryadi, kerjasama internasional merupakan suatu keharusan, sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. (Agita Suryadi, 2015: 6) Sampai dengan saat ini, Pemerintah Indonesia telah menjalin kerja sama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus berupa *non-self governity territory*. Negara-negara mitra kerjasama Indonesia, terbagi dalam 8 (delapan) kawasan, yaitu (<https://ex.kemlu.go.id/kebijakan/Pages/Kerjasama-Bilateral.aspx>, 2020):

1. Afrika
2. Timur Tengah
3. Asia Timur dan Pasifik
4. Asia Selatan dan Tengah
5. Ameriak Utara dan Tengah
6. Amerika Selatan dan Karibia
7. Eropa Barat
8. Eropa Tengah dan Timur

Selain melakukan kerjasama bilateral, Pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama multilateral. Mengenai pihak-pihak yang menjadi mitra kerjasama multilateral Indonesia, diantaranya:

1. *Organisasai Kerjasama Islam (OKI)*

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko, pada tanggal 22-25 September 1969, dan menyepakati Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB semual didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah unsur Zionis membakar bagian dari Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengoordinasikan kerja sama antarnegara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. OKI saat ini beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika.

Sebagai organisasi internasional yang pada awalnya lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama masalah Palestina, dalam perkembangannya OKI menjelma sebagai suatu organisasi internasional yang menjadi wadah kerja sama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara-negara muslim di seluruh dunia.

2. *G-15*

G-15 berfungsi sebagai wadah kerja sama ekonomi dan pembangunan negara-negara berkembang yang terdiri dari Aljazair, Argentina, Brazil, Chile, Kolombia, India, Indonesia, Iran, Jamaika, Kenya, Malaysia, Mesir, Meksiko, Nigeria, Peru, Senegal, Sri Lanka, Venezuela, dan Zimbabwe. G-15 diharapkan dapat mendayagunakan potensi kerja sama di antara negara-negara berkembang. Melalui peningkatan kerja sama Selatan-Selatan tersebut, pada gilirannya G-15 akan menunjang kredibilitas negara-negara berkembang dalam upayanya untuk mengaktifkan kembali dialog Utara-Selatan. G-15 juga dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan kepentingan negara berkembang dalam forum G-20.

Untuk mencapai tujuannya, G-15 telah mencanangkan berbagai macam proyek pembangunan dan kerja sama teknis dalam berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah bidang perdagangan, usaha kecil dan menengah (SME's), energi, pertambangan, investasi, pembiayaan perbankan dan perdagangan, teknologi informasi, pertanian, pendidikan, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia.

3. *World Trade Organization (WTO)*

World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya.

4. *Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II. Namun, Sidang Majelis Umum yang pertama baru diselenggarakan pada 10 Januari 1946 di Church House, London yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 51 negara. Saat ini terdapat 192 negara yang menjadi anggota

PBB. Semua negara yang tergabung dalam PBB menyatakan independensinya masing-masing.

5. *World Tourism Organization (UN-WTO)*

Istilah UNWTO untuk menyebut Organisasi Pariwisata Dunia PBB baru digunakan pada tahun 2003, untuk membedakannya dari Organisasi Perdagangan Dunia. Tujuan utama UNWTO adalah untuk meningkatkan dan membangun pariwisata sebagai kontributor untuk pembangunan ekonomi, saling pengertian internasional, perdamaian, kemakmuran universal, HAM dan kebebasan dasar untuk semua tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama. UNWTO telah membantu para anggotanya dalam industri pariwisata dunia, yang berperan sebagai faktor penting dalam perkembangan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif bagi pembangunan lingkungan dan warisan sejarah, serta mendukung perdamaian dan saling pengertian antar negara. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, UNWTO melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, memperjuangkan kesetaraan gender, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

6. *G-20*

Krisis ekonomi dan keuangan global yang terjadi pada tahun 2007 merupakan dampak dari sistem arsitektur ekonomi dan keuangan internasional yang tidak berimbang terutama dalam hal regulasi sektor keuangan yang kurang accountable. Berawal dari krisis kredit perumahan (subprime mortgage crisis) di AS, lemahnya regulasi keuangan dan tingginya keterikatan sektor keuangan antar negara, khususnya produk derivatif keuangan, menyebabkan menjalarnya krisis negara maju ke negara berkembang lainnya. Efek domino krisis ekonomi tersebut turut menyeret sektor riil dan mengakibatkan terpuruknya perekonomian negara-negara di dunia.

Untuk mengatasi krisis tersebut, Pemerintah AS berinisiatif menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (G-20 Summit) bagi para pemimpin/kepala negara G-20 yang diadakan di Washington DC tanggal 15 November 2008. Krisis ekonomi global menyadarkan otoritas keuangan dan bank sentral berbagai negara bahwa integrasi sistem keuangan yang semakin erat membutuhkan adanya forum diskusi permanen yang intensif dalam rangka menciptakan stabilitas keuangan global melalui upaya pencegahan dan penyelesaian krisis keuangan internasional. Keanggotaan G-20 terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, Cina, India, Indonesia, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Turki.

7. *Colombo Plan*

Colombo Plan didirikan tahun 1951, pada awalnya bernama *Colombo Plan for Cooperative Economic Development in South and Southeast Asia*. Kini Colombo Plan, yang semula beranggotakan 7 negara anggota Persemakmuran, telah berkembang menjadi suatu organisasi internasional dengan 25 negara anggota terdiri dari negara berkembang dan negara maju yaitu, Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Fiji, India, Indonesia, Iran, Jepang, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Maladewa, Mongolia, Myanmar, Nepal, Selandia Baru, Pakistan, Papua New Guinea, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam.

Seiring dengan perkembangan tersebut, nama Colombo Plan juga berubah menjadi *The Colombo Plan for Cooperative Economic and Social Development in Asia and Pacific* untuk mencerminkan komposisi geografis keanggotaan dan ruang lingkup aktifitasnya yang semakin luas. Pada saat ini fokus kegiatan Colombo Plan adalah pembangunan sumber daya manusia di kawasan Asia dan Pasifik. Indonesia menjadi anggota Colombo Plan tahun 1953.

Tujuan utama Colombo Plan adalah mendukung pembangunan ekonomi dan sosial negara anggota, memajukan kerjasama teknik serta membantu alih teknologi antar negara anggota, memfasilitasi transfer dan berbagi pengalaman pembangunan antar negara anggota sekawasan dengan penekanan pada konsep kerjasama Selatan-Selatan.

8. *Gerakan Non-Blok (GNB)*

GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB. KAA merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB. Indonesia menilai penting GNB tidak sekadar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi juga mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Tujuan utama GNB semula difokuskan pada upaya dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas nasional negara-negara anggota. Tujuan penting lainnya adalah penentangan terhadap apartheid; tidak memihak pada pakta militer multilateral; perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme; perjuangan menentang kolonialisme, neo-kolonialisme,

rasisme, pendudukan, dan dominasi asing; perlucutan senjata; tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan secara damai; penolakan terhadap penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional; pembangunan ekonomi-sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian internasional; serta kerja sama internasional berdasarkan persamaan hak. Sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi mulai menjadi perhatian utama negara-negara anggota GNB.

9. *Developing Eight (D-8)*

Developing Eight (D-8) didirikan melalui Deklarasi Istanbul yang dihasilkan oleh Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-1 D-8 pada 15 Juni 1997 di Istanbul, Turki. Deklarasi Istanbul memuat tujuan, prinsip-prinsip, dan bidang-bidang kerja sama D-8, yaitu *peace instead of conflict, dialogue instead of confrontation, justice instead of double-standards, equality instead of discrimination, dan democracy instead of oppression*. D-8 terdiri dari 8 (delapan) negara berkembang, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

Pada mulanya, pembentukan D-8 dimaksudkan untuk menghimpun kekuatan negara-negara Islam anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) guna menghadapi ketidakadilan dan sikap mendua negara-negara Barat. Namun, dalam perkembangannya, D-8 bertransformasi menjadi kelompok yang tidak bersifat eksklusif keagamaan dan ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat negara anggotanya melalui pembangunan ekonomi dan sosial. D-8 ingin meningkatkan posisi negara anggotanya dalam perekonomian dunia, memperluas dan menciptakan peluang-peluang baru dalam bidang perdagangan, memperkuat tercapainya aspirasi negara anggotanya dalam proses pembuatan keputusan pada tingkat global, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat negara-negara anggotanya.

10. *Kelompok 77 dan China*

Kelompok 77 dan China pada dasarnya merupakan forum yang bertujuan mendorong kerja sama internasional di bidang pembangunan, khususnya bagi negara-negara berkembang. Pada perkembangannya, kegiatan Kelompok 77 dan China ditujukan tidak saja untuk memberikan dorongan dan arah baru bagi pelaksanaan kerja sama Utara-Selatan di berbagai bidang pembangunan internasional, tetapi juga dimaksudkan untuk memperluas kerja sama dalam memantapkan hubungan yang saling menguntungkan dan saling mengisi antara sesama negara berkembang melalui Kerja Sama Selatan-Selatan.

Kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, bukan hanya pada kerjasama bilateral dan multilateral. Pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama regional oleh beberapa pihak, diantaranya:

1. Forum Regional ASEAN (ARF)
2. *Melanesian Spearhead Group* (MSG)
3. *Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia* (CICA)
4. *Pacific Island Forum* (PIF)
5. Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (CTI-CFF)
6. *South West Pacific Dialogue* (SwPD)
7. FEALAC
8. Uni Eropa
9. *Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA)
10. *Asia-Europe Meeting* (ASEM)
11. *Indonesia-Asia Cooperation Dialogue*
12. *Asia-Middle East Dialogue* (AMED)
13. *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle* (IMT-GT)
14. *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC)
15. Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika (NAASP)
16. *Indian Ocean Rim Association* (IORA)

Mengenai bidang-bidang yang dijadikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai kerja sama diantaranya:

1. Bidang Ekonomi
2. Bidang Sosial dan Budaya

3. Bidang Pariwisata
4. Bidang Kesehatan
5. Bidang Pembangunan
6. Bidang Teknologi
7. Bidang Politik
8. Bidang Hukum dan Keamanan
9. Bidang Pendidikan

C. Kerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi di Indonesia

Globalisasi menuntut peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Kelangsungan hidup, perkembangan, dan kejayaan sebuah negara dalam persaingan antar bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi melalui pendidikan. Menghadapi kenyataan tersebut, institusi Perguruan Tinggi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, semakin menyadari bahwa mereka sedang menghadapi tekanan besar internasionalisasi pendidikan tinggi. Perubahan sistem pendidikan secara besar-besaran juga telah dilakukan oleh sejumlah negara untuk mendorong setiap institusi perguruan tinggi di negara mereka untuk “memasukkan” sebuah “agenda Internasionalisasi” ke dalam kebijakan institusi mereka –baik secara implisit maupun eksplisit. Bahkan, untuk merespons tantangan tersebut, sejumlah negara maju mulai melakukan investasi secara besar-besaran dalam “bisnis” jasa Pendidikan ini termasuk mempromosikan sistem internasionalisasi perguruan tinggi yang ada di negara mereka. (Asiqin Zuhdi, 2018: 125).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusianya sehingga bisa bersaing di kancah global adalah dengan menerbitkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada konsideran Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi huruf c yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Berdasarkan konsideran tersebut, kemudian diturunkan pada bagian keempat belas tentang kerjasama internasional pendidikan tinggi, tepatnya pada Pasal 50. Pada pasal tersebut, terdapat 5 ayat yang membahas mengenai garis besar kerjasama internasional pendidikan tinggi. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Pasal 50 ayat 1 mendefinisikan kerja sama internasional merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.

Kemudian pada ayat selanjutnya, berisi mengenai prinsip yang harus dilaksanakan pada saat kerja sama internasional pendidikan tinggi. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Sementara itu, pada ayat 3 berisi mengenai cakupan yang bisa dilakukan kerja sama internasional. Selanjutnya, pada ayat 4 peraturan tersebut cara yang dapat dilakukan pendidikan tinggi Indonesia untuk melakukan kerjasama internasional. Pada bagian penutup pasal mengenai kerjasama internasional pendidikan tinggi berisi mengenai pengaturan wilayah teknis dari kerjasama yang akan diatur oleh peraturan menteri.

Menurut Satoto E. Nayono, penyelenggaraan kegiatan kerjasama antara perguruan tinggi Indonesia dan perguruan tinggi atau institusi di luar negeri harus memenuhi syarat dan ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Selain itu, kerjasama tersebut juga harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut (Satoto E. Nayono, 2012: 3) :

- a) Kerjasama yang dilakukan harus mendukung pembangunan nasional dan mempunyai sumbangan dalam pengembangan daya saing bangsa;
- b) Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama harus menjunjung kesetaraan dan saling menghormati;
- c) Pelaksanaan kerjasama harus dilakukan dengan kreatif, inovatif dan saling bersinergi untuk saling mengisi sehingga mempunyai nilai tambah untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- d) Masing-masing pelaku kerjasama harus mendapatkan manfaat yang setara sehingga kegiatan dapat terlaksana secara keberlanjutannya; dan
- e) Kerjasama yang dilakukan juga harus mempertimbangkan keberagaman, baik lintas daerah, nasional atau negara

Selain harus memperhatikan unsur-unsur yang sudah disebutkan, untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri atau aktor lainnya, beberapa persyaratan umum dan persyaratan khusus yang harus diperhatikan. Mengenai persyaratan umum yang harus diperhatikan, diantaranya (Satoto E. Nayono, 2012: 3):

1. Tidak ada ikatan politik dalam perjanjian kerjasama tersebut;
2. Berlandaskan pada asas kemitraan yang sejajar dan tidak semata-mata mencari keuntungan;
3. Harus tersedianya tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung di perguruan tinggi;
4. Adanya kejelasan kegiatan program; program-program kerjasama harus selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum, dan sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi;
5. Adanya kejelasan sumber dana untuk pembiayaan kegiatan kerjasama; dan
6. Adanya kontribusi positif dari program/kegiatan kerjasama; kerjasama dilakukan dengan asas saling menguntungkan dan kebersamaan.

Sedangkan untuk persyaratan khusus yang harus diperhatikan apabila akan melakukan kerjasama dengan perguruan luar negeri atau mitra di dunia internasional, seperti (Satoto E. Nayono, 2012: 3):

1. Negara tempat perguruan tinggi asing berdomisili

Dalam memilih mitra kerjasama, perguruan tinggi di Indonesia diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga-lembaga lain yang berdomisili di negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik.

2. Jenis lembaga mitra di luar negeri

Ada beberapa jenis lembaga yang bisa dijadikan mitra kerjasama, yaitu:

- a) Perguruan tinggi. Untuk mitra perguruan tinggi di luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Perguruan tinggi tersebut berdomisili di negaranya, bukan perguruan tinggi cabang atau *franchise* dari perguruan tinggi negara lain;

Kelembagaannya dan program studinya telah terakreditasi, baik di negaranya maupun di Indonesia

- b) Lembaga riset
- c) Lembaga-lembaga lain yang berminat dalam program pengembangan pendidikan tinggi

Untuk pendidikan tinggi di Indonesia, terbagi atas 2 jenis yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berada di lingkungan Kemenristek dan Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) yang berada di lingkungan Kemenag. Masing-masing kelembagaan memiliki kesamaan maupun perbedaan dalam prosedur pengajuan kerjasama internasional. Mengenai rincian prosedur dari masing-masing pendidikan tinggi yang berada di masing-masing kementerian tersebut, akan dibahas pada sub selanjutnya.

1. Kerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi di Kemenristek RI

Seperti yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, bahwa untuk pengaturan wilayah teknis akan diatur oleh peraturan menteri. Guna memudahkan kerjasama internasional, Kemenristek menerbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek) No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dengan hadirnya peraturan tersebut, membuat administrasi yang berkaitan dengan kerjasama internasional lebih tertib.

Secara keseluruhan peraturan tersebut berjumlah 29 pasal dengan pembagian bab sebanyak 7 (tujuh). Pada bagian awal peraturan membahas mengenai ketentuan umum. Kemudian pada bab selanjutnya secara berturut-turut mulai dari bab kedua sampai keempat membahas mengenai bentuk kerjasama, penyusunan kerja sama, dan pelaporan kerja sama. Sementara dari bab kelima hingga bab ketujuh berisi mengenai ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Untuk bisa melakukan kerja sama, pendidikan tinggi di bawah naungan Kemenristek harus memenuhi asas-asas yang telah ditentukan, seperti legalitas; kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; kepentingan nasional; saling menghargai dan menguntungkan; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator

kinerja, efektif, dan efisien. Sementara itu, muatan mengenai teknis kerja sama pendidikan tinggi dimulai pada bagian bab kedua mengenai bentuk kerja sama, termasuk di dalamnya kerja sama internasional atau luar negeri. Pada peraturan tersebut, bentuk kerja sama dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri. Suatu kerja sama dapat dikatakan sebagai kerja sama luar negeri apabila kerja sama tersebut dilakukan dengan pemerintah dan/atau badan hukum negara lain; kerja sama dengan dua atau lebih negara dan/atau badan hukum internasional.

Mengenai tahapan penyusunan kerjasama internasional pendidikan tinggi, terdapat 4 (empat) tahapan yang harus dilalui, yaitu penajakan; perundingan; perumusan naskah; dan penandatanganan. Untuk tahapan penajakan, pendidikan mulai mencari aktor luar negeri yang memiliki tujuan yang sama. Jika sudah menemukan aktor yang memiliki tujuan yang sama, masuk pada tahap perundingan dengan aktor tersebut. Pada bagian ini, pendidikan tinggi dan aktor luar negeri tersebut akan menentukan ruang lingkup mana saja yang akan dilakukan bersama guna mencapai tujuan dan hasil yang jelas hingga pada tahap selanjutnya akan dituliskan pada Naskah Kerja Sama Luar Negeri. Untuk tahap ini, pendidikan tinggi yang akan merumuskan harus melibatkan Unit Pemrakarsa, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Luar Negeri, dan unit kerja/instansi terkait lainnya. Mengenai unsur-unsur yang ada pada Naskah Kerja Sama Luar Negeri sedikitnya terdiri atas judul, tujuan, ruang lingkup kerja sama, kegiatan yang akan dilakukan, dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab.

Selanjutnya, apabila sudah mencapai kesepakatan yang sudah dirumuskan dalam naskah, para aktor tersebut masuk pada tahap penandatanganan naskah kerja sama. Dalam naskah kerja sama tersebut, terdiri atas nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Setelah itu, pendidikan tinggi yang terlibat melakukan koordinasi dengan Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik. Koordinasi tersebut dilakukan bertujuan untuk Biro Kerja sama dan Komunikasi Publik melakukan telaah pada aspek substansi dan program serta aspek hukum. Pada tahap selanjutnya, setelah ditelaah oleh Biro Kerja sama dan Komunikasi Publik naskah tersebut dijadikan bahan dengan mitra/pihak negara lain. Apabila sudah mencapai kesepakatan, maka naskah final tersebut akan ditelaah kembali oleh Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik dan mendapatkan paraf. Tahap selanjutnya naskah final tersebut ditandatangani dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Setelah selesai semua tahapan tersebut, maka masuk pada tahap pelaporan kerja sama. Untuk tahap ini, yang bertugas untuk melaporkan adalah Unit Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Jangka waktu pelaporan tersebut dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. Segala bentuk laporan tersebut, harus diunggah ke aplikasi

sistem informasi Kerja Sama Kementerian. Untuk pihak yang mengelola sistem informasi Kerja Sama tersebut adalah Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik.

2. Kerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi di Kemenag RI

Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Agama RI telah melakukan berbagai upaya dalam rangka membina dan mengembangkan program kerjasama internasional di kampus-kampus Perguruan Tinggi Keagamaan dan Keislaman Negeri (PTKIN). Lewat Biro KLN, Kemenag telah menerbitkan sejumlah regulasi terkait peningkatan kerjasama luar negeri.

Namun demikian, regulasi yang ada masih terbatas kepada regulasi yang dibuat pemerintah pada tahun 2012 dan 2018. Kemenag sudah pernah membuat petunjuk teknis kegiatan kerjasama internasional untuk lembaga-lembaga di bawah PTKIN pada tahun 2018. Namun, payung hukum dan regulasi yang lebih kuat untuk mengembangkan kerjasama internasional dalam bidang pendidikan yang sudah disiapkan sejak 2018 tidak kunjung disahkan hingga pertengahan tahun 2020 ini.

Kondisi masih lemahnya regulasi di bidang kerjasama internasional ini tidak berarti membuat Kemenag tidak memiliki perhatian dalam kerjasama internasional. Misalnya, pada 16 Mei 2020 yang lalu, Direktorat PTKI mengadakan Rapat Koordinasi Penguatan Kerja Sama PTKIN yang menghadirkan para pimpinan seperti Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, MA (Direktur PTKI), M. Adib Abdushomad, Ph.D (Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama) DIKTIS, sejumlah Wakil Rektor Bidang Kerjasama PTKIN, Ketua Kerjasama PTKIN, dan Ketua International Office PTKIN, serta pengelola program Mahasiswa Asing di PTKIN.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan ini adalah menjajaki berbagai kemungkinan, terobosan serta strategi bagaimana PTKI dapat tetap mengembangkan kerjasama internasional yang cenderung menurun menyusul adanya pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 yang lalu.

Menurut penjelasan Arskal Salim, akibat Covid-19, otomatis kegiatan internasionalisasi akan tertunda atau bahkan dibatalkan. Tapi, katanya, ada beberapa hal yang bisa diambil manfaatnya. Justru pada saat pandemi global inilah PTKIN harus mencari peluang kegiatan yang mungkin dilakukan secara online dan virtual, dan bahkan menarik jangkauan pesertanya lebih luas.

Dalam hal ini, ada tiga persyaratan penting untuk dapat memaksimalkan kerjasama PTKIN ini, yakni (1) adanya kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan kerja sama internasional, (2) adanya sinergi antara pemangku kepentingan kerja sama di PTKI dan (3) adanya

sistem pendataan kolaborasi yang akurat. Sistem pendataan yang ini dapat menjadi sumber referensi untuk melaksanakan program kerjasama yang sudah dirancang.

Tahun 2019 yang lalu, isu pengembangan kerjasama dan pengelolaan mahasiswa asing pada PTKIN juga dibahas oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini, pada tanggal 30 September 2019, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berhasil menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengembangan Kerjasama Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Jakarta.

Kemenag menganggap kerjasama termasuk internasional sangat penting untuk dikoordinasikan karena nilainya yang strategis dalam pengelolaan hubungan kerjasama nasional dan internasional, termasuk pengelolaan mahasiswa asing pada PTKIN.

Sejak 2018 silam, Kemenag telah melakukan terobosan dalam rangka mengelola mahasiswa asing secara lebih efektif dan efisien. Hal itu dilakukan mulai dari proses rekrutmen calon, hingga proses belajar selama di kampus. PTKIN diamanatkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa asing, karena mereka ini akan menjadi duta yang membantu sosialisasi dan promosi kampus-kampus PTKIN di negaranya masing-masing. PTKIN didorong oleh Kemenag untuk dapat memaksimalkan peluang berinteraksi dengan dunia internasional.

Di bidang lain, Kemenag RI memiliki sejumlah catatan menarik terkait kerjasama internasional. Misalnya pada Juni 2020 yang lalu, Kementerian Agama dan Qatar Charity kembali menyepakati Memorandum Saling Pengertian (MoU) di bidang sosial keagamaan. Hal ini bukan yang pertama di antara kedua lembaga. Termasuk dalam Kerjasama ini adalah kegiatan bantuan sosial keagamaan, pendidikan, kesehatan, serta kegiatan sosial keagamaan lainnya. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri (Karo KLN) Kemenag Mudhofir bersama dengan Direktur Qatar Charity Indonesia Mr. Karam Zeinhom. Qatar Charity merupakan organisasi internasional non pemerintah (NGO) yang telah cukup lama berkiprah untuk membantu Indonesia dalam pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya sosial keagamaan. Sejak tahun 2006, Qatar Charity telah bekerjasama dengan berbagai lembaga dan masyarakat Indonesia dalam bentuk pemberdayaan rumah ibadah, ekonomi umat, pengembangan SDM, bantuan sosial kepada anak-anak dan keluarga Indonesia yang terkena musibah atau korban bencana alam.

Kemenag RI juga melakukan kerja sama internasional di bidang jaminan produk halal. Lewat lembaga yang bernama BPJPH Kemenag telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga dalam menyusun tata tertib urusan pemerintahan di bidang urusan luar negeri, dan dilaksanakan sesuai dengan

politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional, dan hukum serta kebiasaan internasional. Kerjasama internasional di bidang halal ini utamanya dilakukan dalam rangka mendapatkan pengakuan sertifikat halal. Hal tersebut dilakukan dengan lembaga halal luar negeri yang sah untuk menerbitkan sertifikat halal. Lembaga halal luar negeri tersebut merupakan lembaga penerbit sertifikat halal yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga keagamaan Islam yang asli oleh negara setempat. Kerjasama seperti ini penting bagi Kemenag karena perlunya memberikan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan adanya sertifikat halal.

3. Manfaat dan Dampak Kerjasama Internasional Pendidikan Tinggi

Ada banyak manfaat yang akan didapatkan apabila kita memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri. Manfaat tersebut diantaranya (Satoto E. Nayono, 2012: 3):

- a) Manfaat secara politik. Kerjasama pendidikan dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di bidang pendidikan.
- b) Manfaat secara ekonomi. Kerjasama pendidikan dengan luar negeri dapat diupayakan untuk menunjang dan meningkatkan pembangunan ekonomi nasional.
- c) Manfaat secara sosial-budaya. Kerjasama dapat digunakan untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan internasional, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
- d) Dapat digunakan untuk meningkatkan peranan dan citra Indonesia di forum internasional dan hubungan antar negara serta kepercayaan masyarakat internasional
- e) Dapat digunakan untuk meningkatkan alih teknologi yang relevan yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian internasional, dan
- f) Meningkatkan kualitas pendidikan melalui *bench marking* dengan perguruan tinggi luar negeri

BAB III

Kerja Sama Internasional di PTKIN

Sebagaimana dijelaskan di awal, penelitian ini akan mengkaji bagaimana regulasi dan kerjasama internasional di tiga PTKIN di Indonesia, yaitu: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan UIN Walisongo Semarang. Berikut adalah penjelasan hal ini di masing-masing lokasi penelitian.

A. Kerja Sama Internasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kerja sama internasional (luar negeri) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama ini dijalankan dan ditangani oleh Pusat Layanan Kerjasama Internasional (PLKI). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor Un.01/R/HK.00.5/632.2014 tentang Pedoman Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta *juncto* Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 217 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Sama. Di mana dalam Pedoman Kerjasama tersebut dijelaskan bahwa PLKI sebagai unit yang menangani kerjasama internasional (luar negeri) diberikan wewenang sebagai berikut :

- a. Membuat, menyiapkan dan mengajukan draft MoU kepada Wakil Rektor.
- b. Memfasilitasi, menyiapkan dan melaksanakan acara penandatanganan MoU.
- c. Melakukan koordinasi dengan berbagai unit tert di UIN Jakarta perihal kerjasama yang telah ditandatangani Rektor.
- d. Melakukan review, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.
- e. Berkoordinasi dengan Fakultas/Lembaga dan unit terkait dalam menyiapkan draft kerjasama.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya untuk menjalankan dan menangani kerja sama internasional, PLKI berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga yang membawahi bidang kerja sama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini menarik, karena PLKI secara struktural lembaga berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat (LP2M), bukan di bawah Wakil Rektor bidang Kerjasama maupun Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK).

Selama ini, kerja sama internasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilaksanakan oleh PLKI sudah berjalan cukup baik, hal ini terlihat dari jumlah kerja sama internasional yang dilakukan pada 5 tahun terakhir sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

No.	Name of Partner University/Institution	Country	Sign Date	Expiry Date
1	University of Malaya	Malaysia	1/5/2016	1/5/2021
2	Inholland University of Applied Science	Belanda	4/14/2016	-
3	Kyung Dong University	Korea Selatan	4/14/2016	4/14/2021
4	PT. Polaris Edu Partner (PEP)	Korea Selatan	4/18/2016	4/18/2021
5	Adam Mickiewicz University	Polandia	4/21/2016	4/21/2021
6	Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)	Malaysia	5/30/2016	5/30/2021
7	Mevlana University	Turki	6/2/2016	6/2/2021
8	Al-Fatih Islamic Academy , Arabic and Islamic Studies	Suriah	8/18/2016	8/18/2021
9	Sultan Azlan Shah University	Malaysia	8/18/2016	8/18/2021

10	Universiti Putra Malaysia	Malaysia	10/17/2016	10/17/2021
11	FHWS-Wurzburg-Schweinfurt	Jerman	10/17/2016	10/17/2016
12	University of East London	Inggris	11/29/2016	11/29/2020
13	Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST)	Belgia	12/22/2016	12/22/2019
14	Coventry University	Inggris	3/9/2017	3/9/2022
15	Tainan University Alliance (TUA)	Taiwan	3/10/2017	3/10/2022
16	Fukuoka University	Jepang	3/10/2017	3/10/2022
17	Kolej Universiti INSANIAH (KUIN)	Malaysia	3/11/2017	3/11/2022
18	National Institutes of Applied Sciences (INSA)	Prancis	3/27/2017	3/27/2022
19	Jamiyah Singapore	Singapura	4/10/2017	4/10/2022
20	University of South Australia	Australia	5/8/2017	5/8/2022

21	University of Gdansk	Polandia	5/10/2017	5/10/2020
22	Sultan Sharif Ali Islamic University (UNISSA)	Brunei Darussalam	10/16/2017	10/16/2022
23	The Public Affairs Section of the U.S. Embassy Jakarta	U.S.A	10/18/2017	10/18/2020
24	Moscow Islamic Institute	Rusia	10/30/2017	10/30/2022
25	Don Mariano Marcus Memorial State University (DMMMSU)	Philippines	12/5/2017	12/5/2020
26	Kardan University	Afghanistan	12/19/2017	12/19/2022
27	Renew MOU LESPA	Washington	1/1/2018	12/31/2020
28	Damascus University	Suriah	1/24/2018	1/24/2023
29	HWPL	Korea Selatan	2/6/2018	2/6/2018
30	International Islamic University of Islamabad	Pakistan	2/27/2018	2/27/2023
31	Universidad De Sevilla	Spanyol	2/28/2018	2/28/2022

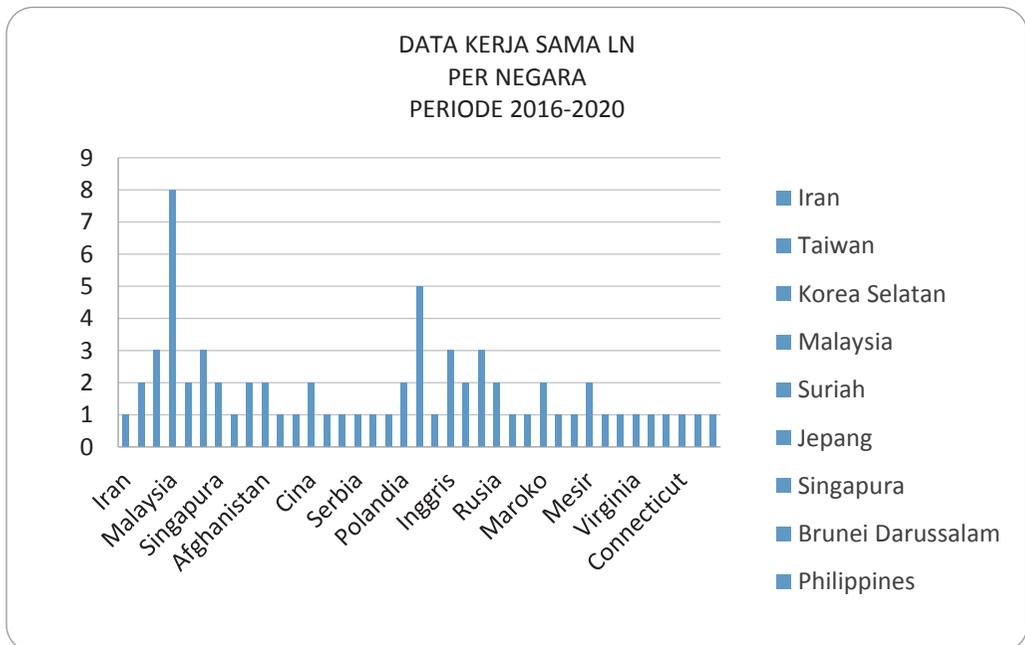
32	Kabul University	Afghanistan	3/6/2018	3/6/2023
33	Lincoln University College Malaysia	Malaysia	4/16/2018	4/16/2023
34	Hayrat Foundation	Turki	6/9/2018	6/9/2023
35	The University of Limoges	Prancis	6/25/2018	6/25/2023
36	Renew MOA IFI	Prancis	7/16/2018	7/16/2020
37	Finland University	Finlandia	9/20/2018	12/31/2022
38	Yamaguchi University	Jepang	10/8/2018	10/8/2023
39	Jamiyah Education Centre (JEC)	Singapura	10/12/2018	10/12/2022
40	Renew University of Canberra	Australia	10/22/2018	10/22/2021
41	Universite Catholique de Louvain (UCL)	Belgia	11/5/2018	11/5/2019
42	Josai University Educational Corporation	Jepang	11/6/2018	11/6/2021
43	Renew Ez-Zitouna University	Tunisia	11/27/2018	11/27/2023
44	Public Transportation Company (PTC)	Saudi Arabia	1/23/2019	1/23/2023
45	Ain Shams	Mesir	2/18/2019	2/18/2024
46	Russia Muftis Council	Rusia	2/27/2019	-

47	AIESEC Indonesia	Indonesia	3/7/2019	-
48	Islamic Cooperation Youth Forum (ICYF)	Turki	5/16/2019	5/16/2021
49	Dar El Hadith El Hassania	Maroko	5/30/2019	-
50	University of Southampton	Inggris	6/18/2019	-
51	Ministry of Education, Bangsamoro	Philippines	6/18/2019	-
52	Guangdong Institute	Cina	6/27/2019	-
53	The Embassy of Gambia in Malaysia	Gambia	7/8/2019	-
54	William & Mary, Virginia	USA	7/10/2019	-
55	Istanbul Foundation for Science and Culture (IFSC)	Turki	7/16/2019	7/16/2022
56	Chinese Academy of Sciences	Cina	9/18/2019	9/18/2024
57	Istanbul Sabahattin Zaim University (IZU)	Turki	9/27/2019	9/27/2023
58	Eastern Asia University (EAU)	Thailand	10/17/2019	10/17/2024

59	Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak	Malaysia	10/30/2019	10/30/2022
60	Hartford Seminary	USA	11/18/2019	11/18/2024
61	Al-Azhar University (Renew)	Mesir	11/27/2019	11/27/2024
62	International Islamic University Malaysia (IIUM)	Malaysia	12/11/2019	12/11/2024
63	Queen's University Belfast	UK	2/25/2020	-
64	IFI	France	4/23/2020	-
65	Mauritania	Mauritania	1/23/2020	1/23/2023
66	Linnaeus University (LNU)	Sweden	1/27/2020	-
67	Victoria University Wellington (VUW)	New Zealand	6/12/2020	6/12/2025
68	University of Hawa'i at Manoa (Renew)	Hawa'i	6/30/2020	6/30/2025

Kalau disederhanakan, jumlah kegiatan kerja sama internasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam kurun 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut

No	Tahun	Jumlah Kerja Sama Internasional
1	2020	6 Kerja sama
2	2019	19 Kerja Sama
3	2018	17 Kerja sama
4	2017	13 Kerja sama
5	2016	13 Kerja sama



**MITRA KERJA SAMA LUAR NEGERI
PERIODE 2016-2020**

BENUA	NEGARA	NAMA MITRA	JUM LAH	TOTAL
ASIA	Iran	University and research institute for Quran and Hadith	1	32
	Taiwan	Chinese Culture University	2	
		Tainan University Alliance (TUA)		
	Korea Selatan	Kyung Dong University	3	
		PT. Polaris Edu Partner (PEP)		
		HWPL		
	Malaysia	University of Malaya	8	
		Sultan Azlan Shah University		
		Universiti Putra Malaysia		
		Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)		
		Kolej Universiti INSANIAH (KUIN)		
		Lincoln University College Malaysia		
		Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak		
		International Islamic University Malaysia (IIUM)		

Suriah	Al-Fatih Islamic Academy , Arabic and Islamic Studies	2
	Damascus University	
Jepang	Fukuoka University	3
	Yamaguchi University	
	Josai University Educational Corporation	
Singapura	Jamiyah Singapore	2
	Jamiyah Education Centre (JEC)	
Brunei Darussalam	Sultan Sharif Ali Islamic University (UNISSA)	1
Philippines	Don Mariano Marcus Memorial State University (DMMMSU)	1
	Ministry of Education Bangsamoro	1
Afghanistan	Kardan University	2
	Kabul University	
Pakistan	International Islamic University of Islamabad	1
Cina	Guangdong Institute	1
	Chinese Academy of Sciences	1
Indonesia	AIIESEC	1
Thailand	Eastern Asia University (EAU)	1

	Saudi Arabia	Public Transportation Company (PTC)	1	
EROPA	Serbia	Belgrade University Serbia	1	23
	Austria	University of Applied Sciences Upper Austria	1	
	Belanda	Inholland University of Applied Science	1	
	Polandia	Adam Mickiewicz University	2	
		University of Gdansk		
		Mevlana University		
	Turki		5	
		Hayrat Foundation		
		Istanbul Foundation for Science and Culture (IFSC)		
		Islamic Cooperation Youth Forum (ICYF)		
		Istanbul Sabahattin Zaim University (IZU)		
	Jerman	FHWS-Wurzburg-Schweinfurt	1	
		University of East London		
Inggris		3		
	Coventry University			

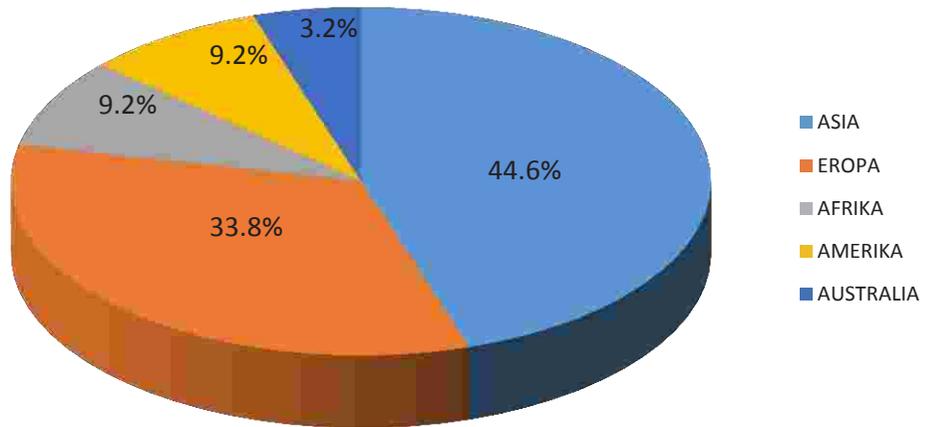
AFRIKA

	Southampton University	
Belgia	Foundation for Internatioal Human Rights Reporting Standards (FIHRRST)	2
	Universite Catholique de Louvain (UCL)	
Prancis	National Institutes of Applied Sciences (INSA)	3
	The University of Limoges	
	IFI	
Rusia	Moscow Islamic Institute	2
	Russia Muftis Council	
Spanyol	Universidad De Sevilla	1
Finlandia	Finland University	1
Maroko	INMAE Center for Research and Perspectives Studies Universite Ibn Tofail Morocco	1
	Dar El Hadith El Hassania	1
Afrika Selatan	International Peace College South Africa	1
Tunisia	Ez-Zitouna University	1
Gambia	The Embassy of Gambia in Jkt	1
Mesir	Ain Shams University	1

7

		Al-Azhar University (Renew)	1	
AMERIKA	Kanada	Canadian Centre Studies	1	5
	Washington	Washington School of Law (LESPA)	1	
	Virginia	William & Mary	1	
	Connecticut	Hartford Seminary	1	
	Embassy in JKT	The Public Affairs Section of the U.S. Embassy Jakarta	1	
AUSTRALIA	Sydney	Western Sydney University	1	2
	Canberra	Univeristy of Canberra	1	
JUMLAH			68	

**DATA KERJASAMA LUAR NEGERI (MoU) AKTIF
PER BENUA
PERIODE 2016-2020 JUMLAH**



Dari table di atas dapat dilihat bahwa jumlah kegiatan kerja sama internasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama ini cenderung naik setiap tahunnya. Hanya saja tahun 2020 ini terkendala oleh COVID-19, sehingga agak susah merealisasikan kerja sama dengan pihak luar.

Kendatipun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PLKI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam menjalankan kerja sama internasional selama ini, di antaranya adalah :

Pertama, Belum terintegrasinya data-data kerja sama yang dimiliki oleh universitas, fakultas, dan/atau unit-unit di lingkungan UIN Jakarta sehingga sulit untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama-kerja sama mana saja yang aktif, berpotensi, atau bahkan pasif. Sulit juga memonitor perjanjian kerja sama (MoU) mana saja yang sudah di implementasikan dalam bentuk Memorandum of Agreement (MoA) atau PKS oleh fakultas ataupun unit-unit. Selain itu, belum terintegrasinya data kerjasama ini juga menyulitkan kita melacak/menghitung nilai kerja sama yang diperoleh.

Kedua, Belum maksimalnya database kerja sama online (UCAST) yang pernah dibuat pada tahun 2015 sehingga data kerja sama belum bisa diakses oleh civitas akademika UIN Jakarta, seperti KaProdi, dosen-dosen atau pihak-pihak yang membutuhkan.

Ketiga, Proses monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama yang sudah ataupun sedang dilakukan belum maksimal. Belum ada alat ukur/survei kepuasan terhadap mitra kerja sama terkait kerja sama yang dilakukan.

Oleh karena itu maka diharapkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki database dalam jaringan (online) kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri yang dapat diakses oleh civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pihak-pihak yang membutuhkan sehingga memudahkan kita untuk ber koordinasi. Selain itu juga diharapkan adanya survei kepuasan mitra yang juga menjadi bagian yang tidak kalah penting sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan kerja sama yg dilakukan.

A. Kerja Sama Internasional di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sama halnya dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kerja sama internasional di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilaksanakan oleh Kantor Internasional yang disebut sebagai *Center for Development and Cooperation of International Affairs* (CDCIA). Dalam struktur kelembagaan, CDCIA ini berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bagian Kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kerjasama internasional di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diatur dalam Pedoman Kerja Sama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di mana kerja sama internasional dapat berbentuk kerja sama yang keluarannya (*output*) adalah pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik yang terlibat dalam program kerja sama tersebut (disebut “Kerja Sama Bergelar”) atau kerja sama yang keluarannya tidak pada pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik, tetapi pada pemberian Sertifikat Alih Kredit (*Credit Transfer Certificate*) bagi peserta didik yang nantinya akan dituliskan pula pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari peserta didik ketika lulus (disebut “Kerja Sama Non-gelar”). Adapun tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a. Penjajakan kerja sama
- b. Pembahasan dan penyusunan draft kerja sama.
- c. Pengesahan kerja sama.
- d. Pelaksanaan kerja sama.
- e. Laporan, monitoring dan evaluasi.

Sudah banyak kegiatan-kegiatan kerja sama internasional yang dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selama ini, hal tersebut dapat di lihat di tabel berikut:

Data Kerja Sama Internasional UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

No	Year	Name	Name of Partner University/Institution	Sign Date	Expiry Date
1	2020	Education, Research and Training Program	Lisafa Centre (<i>Lembaga Pendidikan</i>)	25 Februari 2020	25 Februari 2025
2	2019	Education, Research and Training	Kolej Uniti Malaysia	23 Mei 2019	23 Mei 2024
3		Kerjasama dalam Aktivitas yang terkait dengan Akademik dan Penelitian	Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia	4 September 2019	4 Maret 2020

4		Tridharma Perguruan Tinggi	Ez-Zitouna University	18 Januari 2019	18 Januari 2024
5		Pertukaran mahasiswa, workshop, penelitian	Faculty of Science Prince of Songkla University (PSU)	15 Maret 2019	15 Maret 2024
6		Reciprocal Staff and Student Exchange, Student Study Visit, Short Course Program, Joint Research and Publication	Beijing Education Intitute for International Exchanges	9 Mei 2019	9 Mei 2024
7		Publication of the Proceedings of the 1st Annual International Conference on Social Sciences and Humanities AICOSH 2019	ATLANTIS PRESS	4 Maret 2019	27 Juni 2019
8		Letter of Intent Microelectronic and Nanotechnology Shamsuddin research Centre Institute for Integrated Engineering UTHM and Faculty of Science and Technology State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia	1 Agustus 2019	1 Agustus 2022

9	Letter of Intent UNITI Halal Center Kolej UNITI Malaysia and Faculty of Science and Technology State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta	Kolej Uniti Malaysia	2 Agustus 2019	2 Agustus 2022
10	Students Exchange, Research, Academic Exchange, Collaborative Research	University of The Philippines	15 Maret 2019	15 Maret 2024
11	MoU between Faculty of Science and Technology State Islamic University Sunan Kalijaga and Faculty of Science Prince of Songkla University Hat Yai, Songkhla Thailand	Faculty of Science Prince of Songkla University (PSU)		
12	Research, Education and Training Program	The Aligarh Muslim University	4 Oktober 2019	4 Oktober 2024
13	Academic and Cultural Cooperation	Urwat al-Wuthqa International Research Academy	18 Oktober 2019	18 Oktober 2022
14	Academic, Research and Development Collaboration	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia	23 Oktober 2019	23 Oktober 2022

15		Research, Education and Training Program	Persatuan Alumni Indonesia-Thailand (PERSAIT)	18 November 2019	11 November 2024
1	2018	Student and Staff Exchange	Georg-August-Universität Gottingen	20 Desember 2018	20 Desember 2023
2		Academik Cooperation and Exchange	Universiti Putra Malaysia	13 September 2018	3 September 2023
3		Letter of Intent for Collaboration Between Universiti Kebangsaan Malaysia and UIN Sunan Kalijaga Indonesia	Universiti Kebangsaan Malaysia	27 Juli 2018	27 Juli 2021
4		Tri Dharma Perguruan Tinggi	Wuxi Institute of Technology	26 Desember 2018	26 Desember 2023
5		Letter of Agreement between Faculty of Science Prince of Songkla University (PSU), Thailand and Faculty of Science and Technology State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	Faculty of Science Prince of Songkla University (PSU)	24 Desember 2018	24 Desember 2023
6		Penelitian, Pendidikan dan Program Pelatihan	University Islam Sultan Sharif Ali	17 Juli 2018	17 Juli 2023

7		Penelitian dan Keilmuan	Al-Mustafa International University (Qum-Iran)	5 Maret 2018	5 Maret 2023
8		Develop academic and educational collaboration and to promote friendly relations between the two university	Finland University	7 November 2018	31 Desember 2023
9		Education and training programs	Acharya Intitutes	17 Desember 2018	17 Desember 2023
10		declare their respective intentions and to establish a basis of direct cooperation and collaboration in the fields of education and training programs of mutual interest	Intitute Kemahiran Islam Darul Ridzuan	26 September 2018	26 September 2023
11		o ensure a close cooperative relationship between the parties to provide the HWPL peace education to students of party B based on mutual respect and trust	Heavenly Culture, World Peace, Restoration Of Light (HWPL)	14 Februari 2018	14 Februari 2023
12		-	Sultan Azlan Shah University	4 Juli 2018	4 Juli 2021
1	2017	The Thee Parties Wiil promote in	Kyoto University	4 Oktober	4 Oktober 2021

		particular the following activities		2017	
2		Pendirian Pusat Pelatihan Bahasa Arab	Jamiah Imam Muhammad Ibn Saud	3 April 2017	3 April 2022
3		Exchange, Research and Publications	Universiti Kebangsaan Malaysia	18 Oktober 2017	18 Oktober 2022
4		Pelaksanaan dan Pengembangan Program Akademik	Amman Arab University	29 Agustus 2017	29 Agustus 2022
5		Strengthening, promoting and developing academic, research and cultural cooperation	The University of Newcastle	26 September 2017	26 September 2021
6		Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Kerja Sama	Institut Iqra Bintulu Serawak Malaysia	18 Mei 2017	17 Mei 2022
1	2016	Memorandum of Understanding (MoU) between Institute of France in Indonesia (IFI) and Faculty Science of Science and Technology State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta	Institute of France in Indonesia	20 April 2016	20 April 2020
2		International Conference of Asian	Special Libraries Association, Asian	4 Agustus	31 Desember

	Special Libraries	Chapter (SLA-AC)	2016	2017
3	Memorandum of Understanding Cooperation in the Field of Nuvoton Academic Program Between UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta and Nuvoton Technology Corporation	Nuvoton Technology Corporation	29 Januari 2016	29 Januari 2018
4	Erasmus+ Programme	University of Gottingen Germany	20 Desember 2016	1 Juli 2021
5	Joint Research, Academic Meetings, Student Exchange, Lectureship	Vrije Universiteit Amsterdam	15 Februari 2016	15 Februari 2021
6	Pelaksanaan dan Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi	Suez Canal University	27 September 2016	27 September 2021
7	Conferences, Researches, Teachings, and Community Services of Cultural and Islamic Psychology	International Association of Muslim Psychologist (IAMP)	12 Oktober 2016	11 Oktober 2019
8	Buka Puasa Bersama Dalam Rangka Pendistribusian Al Quran Braille Elektronik	Qatar Charity Indonesia Office	23 Juni 2016	30 Juni 2016

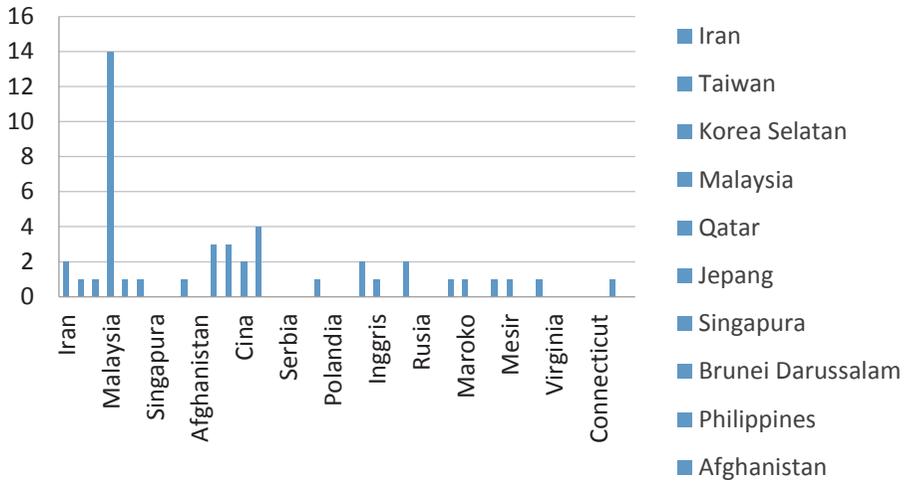
9	Academic and Research Collaboration	Universiti Tun Hussein Onn Malaysia	8 April 2016	8 April 2021
10	Personnel Secondment	Mennonite Central Committe	22 Februari 2016	21 Februari 2019
11	Penyediaan Asrama Mahasiswa	Yayasan Pusat Persatuan Kebudayaan Islam Indonesia (United Islamic Cultural Center of Indonesia)	6 September 2016	6 September 2021
12	Pendidikan dan Pelatihan	Rabitah Jamiat Islamiyah	28 September 2016	28 September 2019
13	Pengembangan Akademik, Pendidikan dan Penelitian	University of East London	29 November 2016	28 November 2020
14	Academic exchange, joint research, exchange of publications and sharing programs	University of Malaya	10 Agustus 2016	9 Agustus 2021
15	Pelatihan, Seminar/Konferensi, Academic Exchange, Joint Degree	Jamiah Zaituna	5 Desember 2016	5 Desember 2018

Sumber : <https://uin-suka.ac.id/id/page/kerjasama>

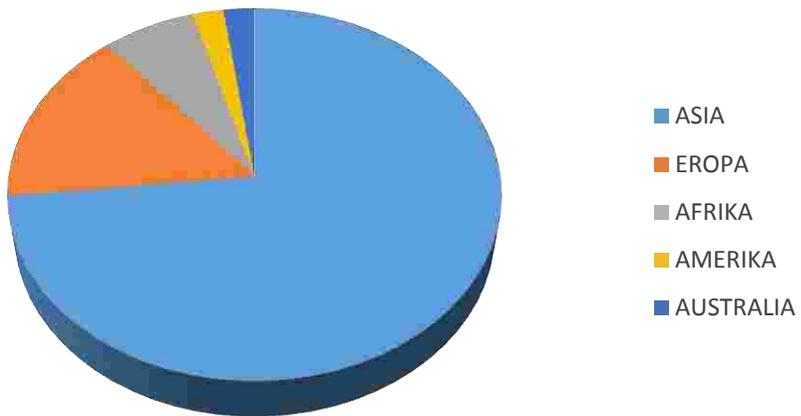
Kalau disederhanakan, jumlah kegiatan kerja sama internasional di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat dilihat sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Kerja Sama Internasional
1	2020	1 Kerja sama
2	2019	14 Kerja sama
3	2018	12 Kerja sama
4	2017	6 Kerja sama
5	2016	15 Kerja sama

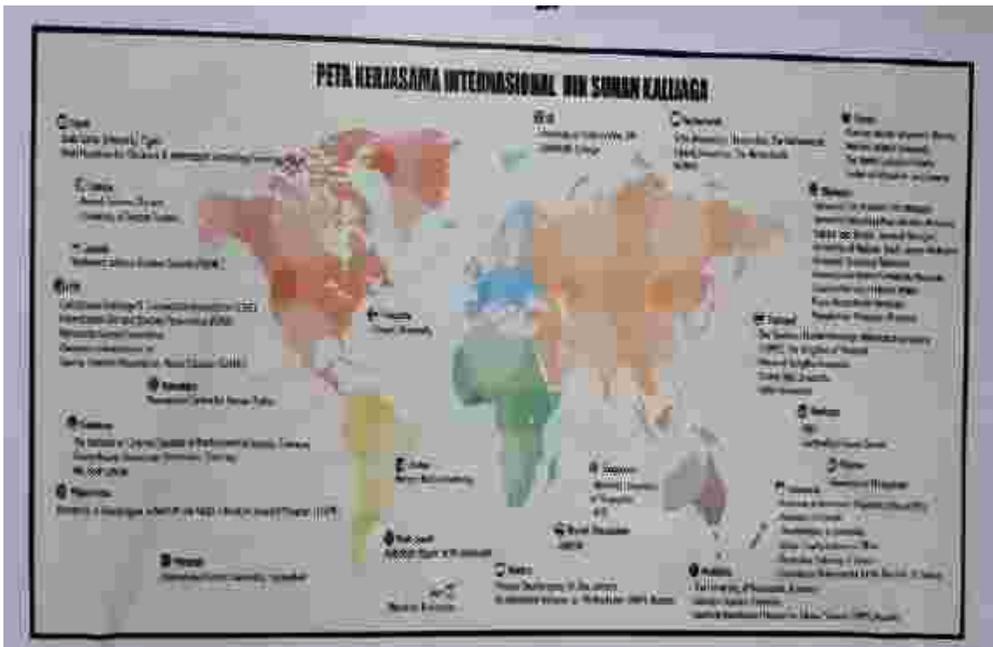
DATA KERJA SAMA LN
PER NEGARA
PERIODE 2016-2020



DATA KERJASAMA LUAR NEGERI (MoU) AKTIF
PER BENUA
PERIODE 2016-2020 JUMLAH



Peta Kerjasama Internasional UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh CDCIA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam melakukan kerjasama internasional selama ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, posisi CDCIA secara struktural berada di bawah Bagian Kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sehingga dengan demikian menyulitkan bagi CDCIA untuk menginisiasi dan meningkatkan jumlah mitra kerja sama internasional. Apalagi selama ini CDCIA dalam tugasnya hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh pimpinan yang lebih tinggi.

Kedua, belum terkoordinasinya sistem kerja sama satu pintu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini akhirnya berdampak pada beberapa fakultas dan unit lainnya yang melakukan kerja sama internasional secara mandiri dan tidak terdata dan terkoordinir dengan baik di CDCIA.

Ketiga, pada umumnya selama ini mitra luar negeri yang telah menjalin kerja sama dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mempersyaratkan adanya kegiatan awal sebelum dilakukan kerja sama secara resmi. Hal ini tentunya menjadi tantangan sendiri bagi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya CDCIA dalam meningkatkan jumlah kerja sama internasional.

Keempat, CDCIA tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan inisiasi dan menjalin kerja sama internasional.

B. Kerjasama Internasional di UIN Walisongo Semarang

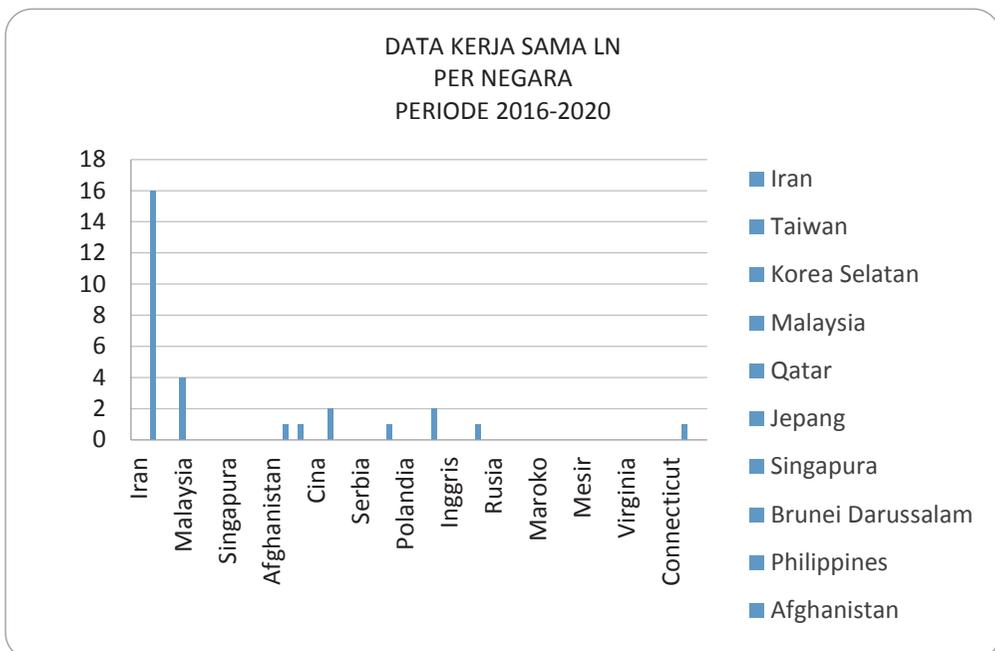
Sebagaimana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebelumnya, kerja sama internasional di UIN Walisongo Semarang juga dilaksanakan dan dibidangi oleh Kantor Internasional atau *Internasional Office* UIN Walisongo Semarang. Tetapi berbeda dengan CDCIA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, International Office UIN Walisongo Semarang bukanlah bagian atau berada di bawah Bagian Kerjasama, melainkan unit sendiri yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor dengan berkoordinasi dengan Wakil Rektor yang membidangi Kerja sama. Sedangkan untuk pedoman pelaksanaan kerja sama internasional tertuang dalam Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 060 Tahun 2015 tentang Arah Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Kerjasama UIN Walisongo Semarang.

Sudah banyak kerja sama internasional yang selama ini dilakukan oleh UIN Walisongo Semarang, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

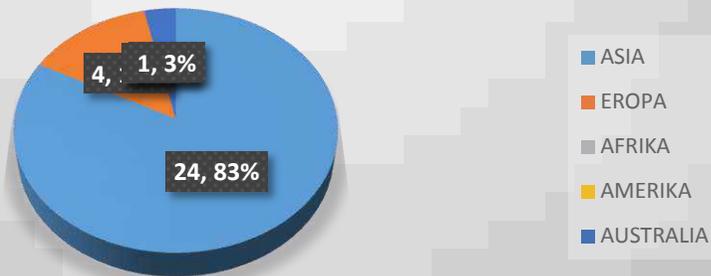
No	International Partner	Country	Type of Document	Year
1.	Saudi Electronic University	Saudi Arabia	MoU	2018
2.	The University of Newcastle	Australia	MoU	2019
3.	Vrije Universiteit (VU) Amsterdam / VU Medical Center (VU-Vrije Foundation)	Netherlands	MoU	2019
4.	Chia Nan University Taiwan	Taiwan	MoU	2017
5.	Hongfu Technology Taiwan	Taiwan	MoU	2017
6.	Jiangsu Vocational Institute Of Architectural Technology	Taiwan	MoU	2019
7.	Jiangsu Ocean University	Taiwan	MoU	2019
8.	Jiangsu Shipping College	Taiwan	MoU	2019
9.	Jiangsu Vocational College of Information Technology	Taiwan	MoU	2019
10.	Jiangsu Vocational College of Architectural Technology	Taiwan	MoU	2019
11.	Nanjing Agricultural University	Taiwan	MoU	2019
12.	Nanjing Tech University	Taiwan	MoU	2019
13.	Nanjing University of Information Science & Technology	Taiwan	MoU	2019
14.	Nanjing University of Post and Telecommunications	Taiwan	MoU	2019
15.	Nantong College of Science and Technology	Taiwan	MoU	2019
16.	Suzhou Polytechnic Institute of Agriculture	Taiwan	MoU	2019
17.	Yancheng Teachers University	Taiwan	MoU	2019
18.	Wuxi Vocational Institute of Arts & Technology	Taiwan	MoU	2019
19.	Suzhou Vocational Health College	Taiwan	MoU	2019
20.	Jawaharlal Nehru University	India	MoU	2019
21.	University of East London	England	MoU	2016
22.	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	Malaysia	MoU	2015
23.	Universiti Teknologi Mara Melaka (UiTM)	Malaysia	MoU	2015
24.	Sultan Azlan Shah University Malaysia	Malaysia	MoU	2016
25.	International Institute of Islamic Thought (IIIT)	Malaysia	MoU	2017
26.	Institute Of France In Indonesia	France	MoU	2016
27.	Universiti Faten Thailand	Thailand	MoU	2016
28.	Jaman Islam Syekh Daud Al-Fathani	Thailand	MoU	2018

Kalau disederhanakan, kegiatan kerja sama internasional di UIN Walisongo Semarang dapat dilihat sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Kerja Sama Internasional
1	2020	-
2	2019	16 Kerja sama
3	2018	2 Kerja sama
4	2017	3 Kerja sama
5	2016	4 Kerja sama
6	2015	3 Kerja sama



DATA KERJASAMA LUAR NEGERI (MoU) AKTIF PER BENUA PERIODE 2016-2020 JUMLAH



Kalau dibandingkan dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jumlah kerja sama internasional yang telah dilakukan oleh UIN Walisongo Semarang memang belum banyak. Demikian juga kalau dibandingkan dengan jumlah kerja sama nasional di UIN Walisongo Semarang sendiri. Berdasarkan laporan tahunan Rektor, pada tahun 2016 total kerja sama internasional hanya 7% dibandingkan dengan total keseluruhan kerja sama, dan bahkan di tahun 2018 hanya 3%.

Dari penelitian yang kami lakukan ke UIN Walisongo Semarang, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan kerja sama internasional, di antaranya adalah masalah anggaran yang kurang memadai untuk melakukan inisiasi dan perintisan kerja sama internasional. Kendala lainnya adalah belum terjalannya harmonisasi yang baik antara International Office dengan beberapa fakultas dan unit yang lain, sehingga kerjasama yang telah dilakukan terkadang sulit untuk direalisasikan.

Kendatipun demikian, *positioning* yang ditempati oleh International Office secara struktural sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di UIN Walisongo Semarang sebenarnya cukup menguntungkan. Sehingga mereka bisa lebih leluasa menjalin kerja sama internasional sebanyak mungkin.

BAB IV

Hambatan-hambatan Kerjasama Internasional di PTKIN

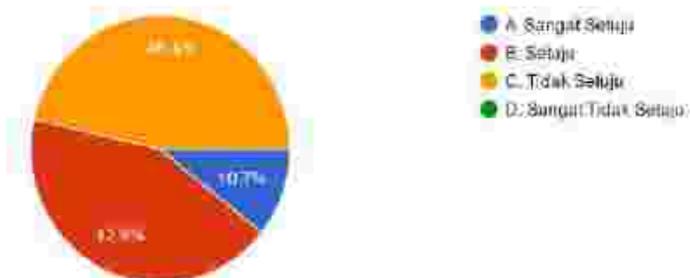
Kerjasama internasional merupakan program penting di kampus dan menjadi faktor utama dalam mewujudkan internasionalisasi pendidikan tinggi. Namun pada pelaksanaannya, banyak sekali hambatan dan tantangan yang dialami oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan program kerjasama internasional ini. Beberapa faktor yang menjadi penghambat kerjasama internasional di perguruan tinggi antara lain regulasi dan kebijakan, perencanaan, pendanaan, harmonisasi dan support system.

Dalam bab ini akan digambarkan hasil kuesioner terkait faktor penghambat kerjasama internasional di PTKI, harapan dan peluang yang harus dilakukan untuk meningkatkan kerjasama internasional di PTKI, serta kebijakan dan langkah strategis apa yang harus ditempuh guna meningkatkan kerjasama internasional di PTKI. Selain itu, dalam bab ini juga akan dibahas hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi keagamaan Islam dalam melaksanakan kerjasama internasional yang meliputi keterbatasan kerjasama internasional hanya pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU), pendanaan dan *Support System* kerjasama internasional, serta monitoring dan evaluasi kerjasama internasional. Berikut adalah penjelasan hal ini di masing-masing PTKIN.

A. Faktor-faktor Penghambat Kerjasama Internasional

Peneliti menjabarkan faktor-faktor yang menjadi penghambat kerjasama internasional ke dalam beberapa pernyataan kuesioner. Berikut adalah hasil kuesioner terkait faktor-faktor penghambat kerjasama internasional di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI):

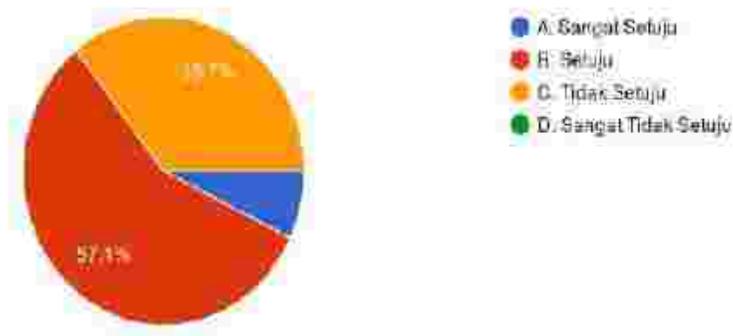
1. Kemenag RI sudah memiliki regulasi kerjasama internasional yang baik dan komprehensif bagi PTKIN.
28 responses



Pertama, peneliti menanyakan tentang regulasi kerja sama internasional di Kemenag RI bagi PTKIN. Dari chart di atas diketahui bahwa 46.4% responden tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan ditambah 10.7% responden menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, 57.1% responden menyatakan bahwa Kemenag RI belum memiliki regulasi kerja sama internasional yang baik dan komprehensif bagi PTKIN. Sementara sebanyak 42.9% responden menyatakan setuju dengan pernyataan ini. Menurut mereka Kemenag RI sudah memiliki regulasi kerja sama internasional yang baik dan komprehensif bagi PTKIN.

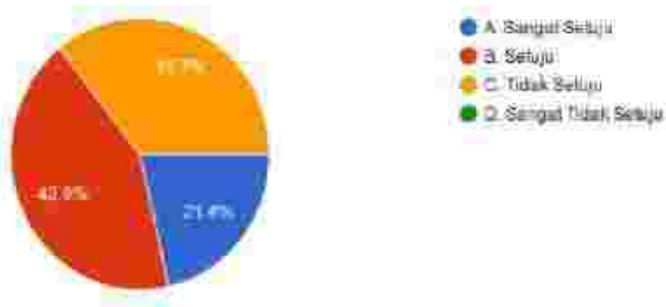
2. Kemenag RI sudah memiliki unit kerja yang mendukung kerja sama internasional di lingkungan PTKIN secara maksimal.

28 respondents



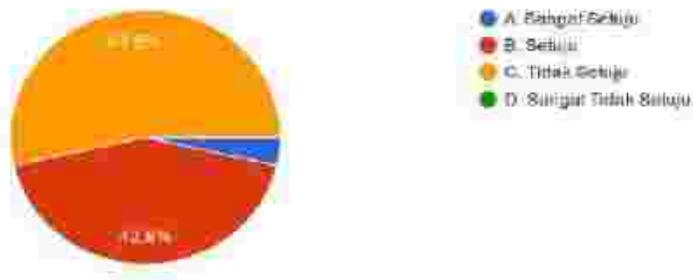
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Kemenag RI sudah memiliki unit kerja yang mendukung kerja sama internasional di lingkungan PTKIN secara maksimal. 64.3% responden menyatakan setuju bahwa Kemenag RI sudah memiliki unit kerja yang mendukung kerja sama internasional di lingkungan PTKIN secara maksimal. Hanya 35.7% responden yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan ini.

3. Unit kerja di Kemenag RI yang menangani kerja sama internasional memiliki peran yang sangat penting dan telah bekerja maksimal dalam membantu meningkatkan kerja sama internasional PTKIN.
29 responses



Ketiga, peneliti menanyakan apakah unit kerja di Kemenag RI yang menangani kerja sama internasional memiliki peran yang sangat penting dan telah bekerja maksimal dalam membantu meningkatkan kerja sama internasional di PTKIN. 21.4% responden menyatakan sangat setuju, 42.9% menyatakan setuju dan sisanya sebesar 35.7% menyatakan tidak setuju.

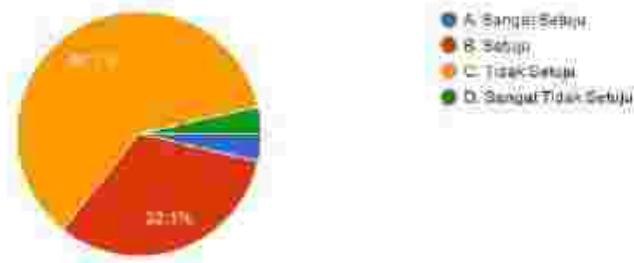
4. Kampus-kampus di lingkungan PTKIN sering berkoordinasi dengan Kemenag RI dalam hal perencanaan, perintisan dan pelaksanaan kerja sama internasional.
28 responses



Keempat, terkait dengan ada/seringnya koordinasi antara kampus-kampus di lingkungan PTKIN dengan Kemenag RI dalam hal perencanaan, perintisan dan pelaksanaan kerja sama internasional. Dari chart di atas dapat dilihat bahwa 53.6% responden menyatakan tidak setuju. Artinya, sebanyak 53.6% responden menyatakan belum ada koordinasi antara kampus-kampus di lingkungan PTKIN dengan Kemenag RI dalam hal perencanaan, perintisan, dan pelaksanaan kerja sama internasional. Sementara 42.9% lainnya menyatakan setuju bahwa sering ada koordinasi antara kampus-kampus di lingkungan PTKIN dengan Kemenag RI dalam pelaksanaan kerja sama internasional.

5. Selama ini naskah kerja sama Internasional kampus-kampus di lingkungan PTKIN terdata dan tersimpan dengan baik di Kemenag RI.

28 responses



Pertanyaan terakhir terkait dengan pendataan dan penyimpanan naskah kerja sama internasional. Apakah selama ini naskah kerja sama internasional kampus-kampus di lingkungan PTKIN terdata dan tersimpan dengan baik di Kemenag RI. Sebanyak hampir 61% responden menyatakan bahwa naskah kerja sama internasional kampus-kampus di lingkungan PTKIN belum terdata dan tersimpan dengan baik di Kemenag RI.

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, dapat disimpulkan bahwa kampus-kampus UIN di bawah PTKIN yang diteliti (UIN Jakarta, UIN Yogya dan UIN Semarang) mengalami banyak hambatan dan tantangan dalam melaksanakan program kerja sama internasionalnya yang disebabkan oleh sejumlah faktor diantaranya: regulasi dan kebijakan yang lemah, perencanaan yang kurang matang, pendanaan yang tidak memadai, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta masih lemahnya support system bagi berbagai kampus di PTKIN.

B. Harapan dan Peluang Kerja Sama Internasional di PTKIN

Berikut adalah hasil kuesioner terkait harapan dan peluang kerja sama internasional di PTKIN:

6. Kerja sama Internasional yang selama ini sudah dilakukan oleh kampus saya sudah maksimal.
211 respondents



Dari chart di atas dapat dilihat bahwa 53.6% responden menyatakan setuju dengan pernyataan yang diberikan. Mereka menyatakan bahwa kerja sama internasional yang selama ini sudah dilakukan oleh kampusnya sudah maksimal. Sementara 46.4% responden lainnya menyatakan tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan. Artinya, kerja sama internasional yang selama ini sudah dilakukan oleh kampusnya belum maksimal.

7. Kerja sama Internasional merupakan program penting di kampus dan menjadi faktor utama dalam mencapai World Class University.
28 respondents



Chart di atas menunjukkan 100% responden setuju bahwa kerja sama internasional merupakan program penting di kampus dan menjadi faktor utama dalam mencapai World Class University.

8. Kampus Saya membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk peningkatan kerja sama internasional.

26 responses

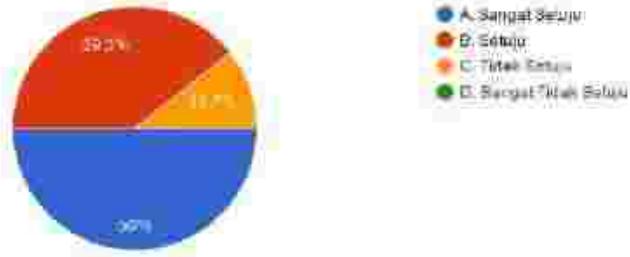
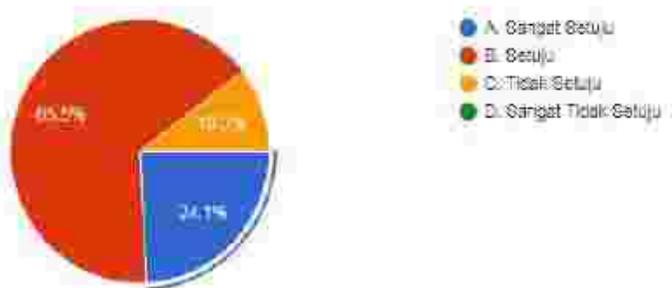


Chart di atas menunjukkan 50% responden sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan. 39.3% responden setuju sementara 10.7% menyatakan tidak setuju. Artinya secara keseluruhan 89.3% responden menganggap bahwa kampus mereka membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk peningkatan kerja sama internasional.

9. Kampus Saya aktif menjalin kerja sama internasional yang bagus dan berkualitas dengan lembaga di luar negeri.

29 responses



Dari chart di atas terlihat 24.1% responden sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan, 65.5% responden setuju, sementara 10.3% responden tidak setuju. Jadi sebanyak 89.6% responden setuju dengan pernyataan ini. Menurut mereka, kampus mereka aktif menjalin kerja sama internasional yang bagus dan berkualitas dengan lembaga luar negeri. Sementara 10.3% responden tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan.

Chart di atas menunjukkan 50% responden setuju, 25% sangat setuju, dan 25%

10. Kampus Saya banyak memberikan kesempatan kerja sama internasional kepada segenap sivitas akademiknya dengan transparan dan terbuka.

28 responses



lainnya tidak setuju. Secara keseluruhan 75% setuju jika kampus mereka banyak memberikan kesempatan kerja sama internasional kepada segenap sivitas akademiknya dengan transparan dan terbuka. Sementara 25% sisanya tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan.

Merujuk pada hasil kuesioner yang didapat terkait harapan dan peluang kerja sama internasional di PTKIN, dapat disimpulkan bahwa kampus-kampus UIN di lingkungan PTKIN memiliki peluang dan harapan yang sangat besar untuk meningkatkan program kerja sama internasionalnya. Melihat pada beberapa kerja sama internasional yang sudah dilakukan dan sebaran mitra kerja sama yang dimiliki, membuka peluang yang sangat besar bagi PTKIN untuk meningkatkan kerja sama internasional tentunya dengan didukung oleh kebiban dan langkah-langkah strategis

C. Kebijakan dan Langkah Strategis Meningkatkan Kerja Sama Internasional di PTKIN

Untuk meningkatkan program kerja sama internasional di PTKIN, kebijakan dan langkah strategis apa yang sudah dilakukan. Berikut hasil kuesioner yang didapat terkait kebiban dan langkah strategis PTKIN untuk meningkatkan kerja sama internasional:

11. Kampus Saya sudah memiliki international office yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dan kerja sama internasional.

28 responden

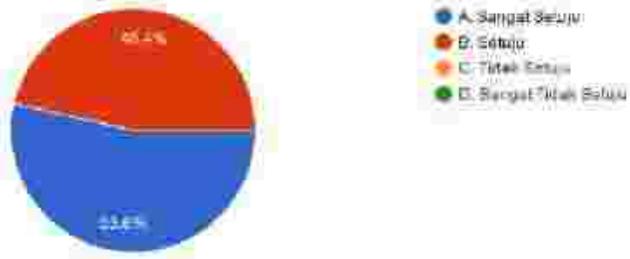
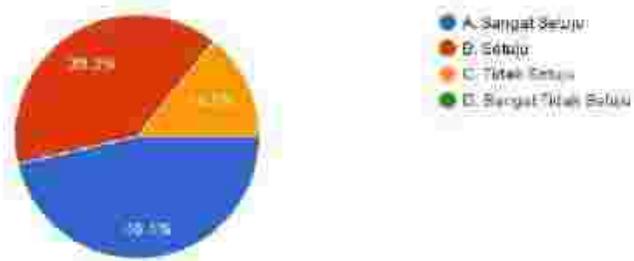


Chart di atas menunjukkan 100% responden setuju dengan pernyataan yang diberikan. Semua responden setuju jika international office di perguruan tinggi keagamaan islam berfungsi sebagai pusat kegiatan dan kerja sama internasional.

12. International office di kampus saya dianggap penting, namun belum memiliki program dan anggaran yang memadai.

28 responden



Dari chart di atas dapat dilihat bahwa 46.4% responden sangat setuju, 39.3% responden setuju dan 14.3% responden tidak setuju. Artinya 85.7% responden setuju dengan pernyataan yang diberikan. Mereka setuju jika international office merupakan bagian yang penting dalam melaksanakan program kerja sama internasional namun belum memiliki program dan anggaran yang memadai.

13. Kampus Saya sudah memiliki data dan informasi yang lengkap sehingga memudahkan koordinasi antar lembaga di PTKIN.

26 responden

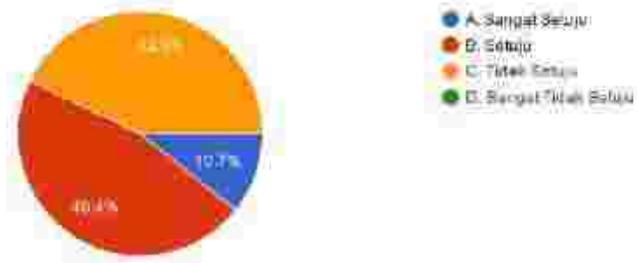


Chart di atas menunjukkan 46.4% responden setuju, 10.7% sangat setuju dan 42.9% tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan. Jadi sebesar 57.1% responden setuju jika kampusnya sudah memiliki data dan informasi yang lengkap sehingga memudahkan koordinasi antar lembaga di PTKIN. Sementara 42.9% responden menyatakan tidak setuju. Artinya, mereka merasa bahwa kampusnya belum memiliki data dan informasi yang lengkap sehingga menyulitkan koordinasi antara lembaga di PTKIN.

14. Kampus Saya berpartisipasi aktif dalam event-event internasional, seperti joint working group (JWG) sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama internasional.

26 responden



Dari chart di atas dapat dilihat bahwa 82.1% responden setuju dengan pernyataan yang diberikan dan 17.9% responden tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan. Sebanyak 82.1% responden menyatakan bahwa kampusnya berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan internasional, seperti joint working group (JWG) sebagai upaya meningkatkan kerja sama internasional. Sementara 17.9% responden lainnya menyatakan sebaliknya.

15. Perjanjian kerja sama internasional dalam berbagai bentuknya hanya dapat dilakukan oleh pimpinan tertinggi di kampus saya.

28 responses



Chart di atas menunjukkan 56.4% responden setuju dan 46.4% responden tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan. 56.4% responden yang setuju menyatakan bahwa perjanjian kerja sama internasional dalam berbagai bentuknya hanya dapat dilakukan oleh pimpinan tertinggi di kampus.

Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kampus-kampus UIN dibawah perguruan tinggi keagamaan islam negeri (PTKIN) yang diteliti (UIN Jakarta, UIN Yogya dan UIN Semarang) sudah melakukan beberapa langkah strategis guna meningkatkan program kerja sama internasional mereka, diantaranya adalah: menjadikan international office sebagai pusat pengelola dan pelaksana kegiatan dan kerja sama internasional dan juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan internasional.

D. Hambatan dan Tantangan Kerja Sama Internasional di PTKIN

1. Kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU)

Kerja sama selama ini identik dilakukan dengan pendatanganan MoU, baik kerjasama nasional maupun kerjasama internasional. Akan tetapi kerja sama bukanlah sekedar penandatanganan MoU semata, melainkan harus diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilakukan dengan mitra kerja sama. MoU adalah langkah awal, sedangkan implementasinya adalah program yang disepakati dalam MoU tersebut. Maka diharapkan MoU yang selama ini sudah berjalan maupun yang akan berjalan harus dikonkretkan ke dalam kegiatan dan program yang dilakukan dengan mitra guna kemajuan perguruan tinggi.

Di ketiga perguruan tinggi keagamaan islam negeri (PTKIN) dimana penelitian ini dilaksanakan, kerja sama internasional yang dilakukan, mayoritas barulah pada tahapan penandatanganan MoU. Adapun implementasinya dalam bentuk program atau kegiatan konkret dan terstruktur antara PTKIN dan mitra kerja sama nya terbilang masih sedikit sekali, sehingga banyak sekali MoU yang sudah ditandatangani namun belum ada implementasi kegiatan dan program konkretnya (*sleep*). Meskipun terkadang penandatanganan MoU diawali dengan sebuah kegiatan terlebih dahulu, seperti seminar, kuliah umum, atau info session namun kegiatan ini hanya berjalan satu kali saja semacam kegiatan pengantar seremonial penandatanganan MoU. Sejatinya, kedua belah pihak dapat mendiskusikan dan merancang kegiatan lanjutan yang terstruktur dan terencana guna kemajuan kedua belah pihak dan sebagai bentuk implementasi dari MoU yang sudah ditandatangani.

Lalu mengapa masih banyak sekali MoU yang belum terimplementasikan secara maksimal? Apa yang menjadi faktor penyebab kerja sama internasional hanya dalam bentuk penandatanganan MoU saja (*sleep MoU*)? Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Pertama, kurangnya koordinasi antara kampus-kampus di lingkungan PTKIN dengan kementerian agama Republik Indonesia dalam hal perencanaan, perintisan, dan pelaksanaan kerja sama internasional. Hal ini membuat kampus-kampus di lingkungan PTKIN menjalankan kerja sama internasionalnya sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan nya masing-masing.

Koordinasi antar kampus di lingkungan PTKIN dengan kementerian agama dalam perencanaan, perintisan dan pelaksanaan

kerja sama internasional sangat penting guna memetakan kebutuhan masing-masing kampus dalam menjalin kerja sama dengan mitra internasional sehingga kerja sama yang dilakukan benar-benar bermanfaat bagi kemajuan perguruan tinggi. Selain itu, dengan adanya koordinasi antara kampus-kampus di lingkungan PTKIN dengan kementerian agama diharapkan dapat memaksimalkan kerja sama internasional yang selama ini sudah berjalan maupun yang akan berjalan bukan sebaliknya. Dengan perencanaan yang matang dan terarah, kerja sama yang dilakukan tentu diharapkan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi perguruan tinggi dan mitra.

Selain kurangnya koordinasi antara kampus-kampus di lingkungan PTKIN dengan kementerian agama, minimnya koordinasi di lingkungan internal kampus sendiri menjadi faktor penyebab tidak aktifnya MoU yang sudah ditandatangani (sleep MoU). Kurangnya koordinasi antara International Office International Office sebagai pusat kegiatan dan kerja sama internasional dengan fakultas, unit, ataupun lembaga di lingkungan kampus. International Office International Office sebagai fasilitator dalam hubungan internasional sekaligus juga komunikator perlu berkomunikasi secara aktif dan efektif memberikan pelayanan informasi kepada semua pihak di lingkungan kampus terkait MoU dan program kerja sama internasional yang sudah berjalan maupun akan berjalan. Melakukan roadshow ke fakultas/unit/lembaga untuk mensosialisasikan kerja sama internasional yang dimiliki sehingga fakultas/unit/lembaga dapat mengusulkan program-program unggulannya untuk kemudian dapat diimplementasikan sebagai program atau kegiatan kerja sama dengan mitra yang dimiliki.

Begitupun sebaliknya, fakultas, unit, dan lembaga yang ada di lingkungan kampus harus berperan aktif dan inisiatif mengimplementasikan program yang telah disepakati dalam MoU ke dalam kegiatan konkret sesuai dengan kebutuhannya masing-masing guna kemajuan perguruan tinggi. Dengan begitu kerja sama tidak lagi hanya sebatas penandatanganan MoU tetapi terimplementasikan dalam program dan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Belum terdapat dan tersimpannya naskah kerja sama internasional kampus-kampus di lingkungan PTKIN dengan baik di kementerian agama RI ataupun di PTKIN sendiri merupakan faktor lain yang menghambat kerja sama internasional di PTKIN. Hal ini lah yang kemudian menghambat koordinasi baik antar kampus di lingkungan PTKIN dengan kementerian agama maupun koordinasi internal antar lembaga di PTKIN itu sendiri.

International Office International Office sebagai pusat kegiatan dan kerja sama internasional di PTKIN seharusnya dapat menjadi pusat

data dan informasi terlengkap dan terkini terkait kerja sama internasional di perguruan tinggi. Data dan informasi ini idealnya dapat diakses oleh fakultas/unit/lembaga sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi. Namun faktanya, data-data kerja sama internasional di perguruan tinggi keagamaan islam negeri masih tersebar, sebagian data berada di International Office International Office, sebagian lainnya tersimpan di fakultas, unit ataupun lembaga.

2. Pendanaan dan *Support System* Kerjasama Internasional

Pendanaan dan *support system* adalah faktor yang paling utama sebenarnya dalam sebuah kerja sama. Perguruan tinggi dan mitra yang melakukan sebuah kerja sama harus menyiapkan pendanaan dan *support system* yang memadai untuk kerja sama tersebut agar bisa diimplementasikan dengan baik. Bagaimana regulasi anggaran dan pelaksanaannya di lingkungan perguruan tinggi keagamaan islam negeri (PTKIN). Apakah sudah memadai?

Kerja sama internasional di lingkungan perguruan tinggi keagamaan islam negeri dilaksanakan oleh International Office International Office sebagai pusat kegiatan dan kerja sama internasional. Sebagai pusat kegiatan dan kerja sama internasional, International Office memiliki tugas, tanggung jawab, dan peran yang sangat penting dalam menjalin dan melaksanakan kerja sama internasional guna meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Sejatinya International Office di perguruan tinggi memiliki peran sebagai fasilitator, promotor, komunikator, eksekutor, dan networker.

Sebagai fasilitator, International Office memfasilitasi hubungan internasional baik dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Promotor, International Office proaktif dalam mempromosikan perguruan tinggi ke dunia luar oleh karena itu harus didukung dengan data dan informasi yang lengkap. Komunikator, International Office berkomunikasi secara efektif dan aktif untuk memberikan pelayanan informasi dan pelayanan prima kepada jejaring internasional, baik yang sudah ada di dalam perguruan tinggi maupun yang masih dalam perencanaan. International Office juga berperan sebagai eksekutor dalam berbagai agenda yang berkaitan dengan hubungan internasional. International Office juga berperan sebagai networker yang berjejaring ke dalam dan ke luar perguruan tinggi. Untuk dapat menjalankan perannya secara maksimal tentu saja harus didukung dengan pendanaan yang memadai.

Faktanya, International Office dianggap penting namun belum memiliki program dan anggaran yang memadai. Minimnya anggaran yang diberikan kepada International Office sebagai pusat kegiatan dan

kerja sama internasional dikarenakan posisi/kedudukannya dalam struktur organisasi. Kedudukan International Office di lingkungan PTKIN belum seragam. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kementerian agama belum memiliki regulasi kerja sama internasional yang baik dan komprehensif bagi PTKIN. Hal ini tentu saja berdampak pada beragamnya regulasi dan kebijakan yang dijalankan oleh masing-masing PTKIN dalam mengelola dan melaksanakan kerja sama internasional. Salah satu dampaknya adalah beragamnya kedudukan/posisi struktural International Office (IO) di lingkungan PTKIN. Perbedaan posisi struktural ini tentu saja berimbas pada fleksibilitas dan ruang gerak International Office sebagai pusat kegiatan dan kerja sama internasional di perguruan tinggi.

Di ketiga PTKIN yang diteliti, International Office memiliki posisi struktural yang berbeda-beda. Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, International Office berada di bawah koordinasi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LP2M). Sementara di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, International Office berada di bawah koordinasi biro kerja sama. Dan yang paling diuntungkan secara struktural adalah International Office di UIN Walisongo Semarang yang sudah berdiri sendiri sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis) sehingga ruang geraknya lebih luas dan fleksibel.

Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, International Office berada dibawah koordinasi kepala bagian kerja sama. Sehingga anggaran yang diberikan kepada International Office di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sangat terbatas. Sebab mengacu pada anggaran yang diberikan kepada bagian kerja sama. Yang pada kenyataan dan prakteknya, dana yang dibutuhkan oleh International Office bisa lebih besar dari dana yang diberikan kepada bagian kerja sama karena program dan kegiatan yang dirancang dan dilakukan International Office adalah guna memenuhi tuntutan internasionalisasi perguruan tinggi.

Begitu pula dengan International Office di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berada di bawah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LP2M). dana yang diberikan kepada International Office sangat minim dibanding dengan tuntutan internasionalisasi perguruan tinggi yang di emban nya.

Berbeda dengan International Office di UIN Yogyakarta dan UIN Jakarta, International Office di UIN Walisongo Semarang sudah menjadi unit pelaksana teknis (UPT), yakni satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu. Mandiri disini artinya diberi kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri. Artinya,

dari segi pendanaan atau keuangan, International Office di UIN Walisongo Semarang lebih diuntungkan.

Minimnya pendanaan kerja sama internasional tentu berdampak pula pada perencanaan kerja sama yang dilakukan. Seringkali penandatanganan MoU dilakukan bukan berdasarkan analisa kebutuhan tetapi sebatas pada pemanfaatan kesempatan. Misal, kunjungan mitra/tamu internasional ke kampus-kampus di lingkungan PTKIN dengan beragam tujuannya seringkali dimanfaatkan dan digunakan sebagai momen untuk penandatanganan MoU oleh pimpinan tertinggi di kampus. Hal inilah yang kemudian seringkali menjadikan MoU tersebut tidak aktif (*sleep*).

Selain pendanaan yang memadai, support system yang meliputi sumber daya manusia, jejaring (*networking*), dan juga pusat data dan informasi memiliki peran yang tidak kalah penting dalam kesuksesan pelaksanaan kerja sama internasional di perguruan tinggi. Sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan berwawasan luas merupakan unsur penting dalam kesuksesan melaksanakan kerja sama internasional. Sementara bagi sebagian besar civitas akademika di kampus-kampus di lingkungan PTKIN, kemampuan bahasa asing sebagai modal dasar komunikasi internasional masih menjadi sebuah tantangan tersendiri.

Jejaring (*networking*) merupakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kerja sama internasional. Jejaring di lingkungan kampus biasanya bersifat individu. Misal, seseorang yang pernah belajar di luar negeri. Selama dia berada di luar negeri dia membangun jejaring dengan kolega-kolega di sana. Sekembalinya ke tanah air, dia memanfaatkan jejaring yang dia miliki untuk melakukan kerja sama internasional yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya tetapi juga bermanfaat bagi kemajuan lembaga/perguruan tinggi.

Support system yang lain yang tidak kalah penting adalah pangkalan/pusat data dan informasi. Dengan adanya data dan informasi yang lengkap memudahkan komunikasi dan koordinasi. Sayangnya, naskah kerja sama internasional di lingkungan perguruan tinggi keagamaan islam negeri belum terdata dan tersimpan dengan baik di kementerian agama RI dan juga di PTKIN sendiri. Data kerja sama internasional yang ada belum terpusat sehingga menghambat koordinasi dan komunikasi.

3. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Internasional

Prinsip dasar kerja sama yaitu menyepakati kerja sama yang dibangun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kerja sama diyakini akan mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengembangan sumber daya manusia dan memperluas jaringan untuk menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternal.

Untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian atau keberhasilan sebuah kerja sama berdasarkan rencana yang telah disusun dan pelaksanaan kerja sama maka dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kerja sama yang selama ini telah dirintis. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan sebuah upaya untuk membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus-menerus dengan cara mengawal atau memantau proses atau hasil. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kerja sama sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, untuk mengetahui kesesuaian kerja sama dengan kesepakatan antara perguruan tinggi dengan mitra kerjasama, untuk menjamin bahwa kerjasama yang dilaksanakan mendukung Visi dan Misi perguruan tinggi.

Lalu bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama internasional di PTKIN. Apakah sudah berjalan optimal. Dari hasil wawancara yang dilakukan di ketiga PTKIN, diperoleh informasi bahwa proses monitoring dan evaluasi kerja sama internasional belum berjalan optimal. Ketiga PTKIN belum memiliki instrumen monitoring dan evaluasi yang baku dan terstruktur yang dapat digunakan untuk mengetahui efektifitas kerja sama yang dilakukan. Bentuk monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan baru sebatas pendataan naskah kerja sama yang dimiliki untuk memantau masa berlaku kerja sama tersebut, apakah sudah berakhir atau akan segera berakhir. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama internasional secara serius belum dilakukan di ketiga perguruan tinggi keagamaan islam negeri ini. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama internasional.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa perguruan tinggi keagamaan islam negeri masih menghadapi kendala dan tantangan yang besar dalam melaksanakan dan mengoptimalkan kerja sama internasionalnya. Tantangan dan hambatan yang dihadapi cukup kompleks seperti belum adanya regulasi kerja sama internasional yang baik dan komprehensif di Kementerian agama RI bagi PTKIN, minimnya pendanaan dan perencanaan kerja sama internasional yang dilakukkan dan kurangnya

koordinasi dan komunikasi yang kesemuanya berdampak pada kerja sama internasional hanya sebatas penandatanganan MoU.

Tantangan dan hambatan yang dialami oleh PTKIN tentu juga dialami oleh perguruan tinggi lainnya yang juga sedang berupaya melakukan program internasionalisasi perguruan tinggi guna mencapai rekognisi global. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prichard (1996), Van Ginkel (1998), de Wit (1998) dan H. Gray (1996) seperti dikutip oleh Chan, Wendy, W.Y (2004) yang mengungkapkan faktor-faktor penghambat atau tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam melakukan kerja sama internasional guna internasionalisasi perguruan tinggi yang meliputi kultur organisasi, pendanaan, komunikasi, dan sumber daya manusia.

Namun demikian, PTKIN tetap berusaha melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kerja sama internasionalnya. Diantaranya adalah menjadikan International Office sebagai pusat kegiatan dan kerja sama internasional dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan internasional seperti joint working group (JWG).

BAB V

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dipaparkan dan berbagai temuan di lapangan, penelitian ini berkesimpulan bahwa:

1. Pemerintah Indonesia, termasuk dalam hal ini Kemenag RI, menganggap bahwa kerja sama internasional di berbagai bidang merupakan program penting. Dalam konteks pendidikan tinggi, di mana Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berdiri dan berada di bawah wewenang administrasi Kemenag RI, kerjasama internasional di kampus-kampus dianggap penting dan menjadi faktor utama dalam mewujudkan internasionalisasi pendidikan tinggi.
2. Namun demikian, pada pelaksanaannya, terdapat banyak hambatan dan tantangan yang dialami oleh kampus-kampus UIN di bawah PTKIN yang diteliti (Jakarta, Yogyakarta dan Semarang). Misalnya, dalam melaksanakan program kerja sama internasional terdapat sejumlah faktor yang menghambat kerjasama internasional di perguruan tinggi, di antaranya: regulasi dan kebijakan yang lemah, perencanaan yang kurang matang, pendanaan yang tidak memadai, kurangnya harmonisasi, koordinasi antar lembaga, serta masih lemahnya support system bagi berbagai kampus di PTKIN.
3. Data dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa hambatan dan tantangan terbesar yang dihadapi oleh kampus-kampus UIN di bawah PTKIN yang diteliti di Jakarta, Yogyakarta dan Semarang dalam melaksanakan kerja sama internasional adalah masih terbatasnya kerjasama internasional hanya pada aspek: (a) penandatanganan nota kesepahaman (MoU), (b) pendanaan yang belum memadai dan (c) *Support System* yang masih lemah. Padahal di semua kampus UIN di bawah PTKIN yang diteliti itu kerjasama internasional merupakan program penting dan seringkali digadag-gadag sebagai faktor penting yang akan membawa kampus tersebut menjadi kampus berkelas dunia dan bereputasi internasional. Terakhir, (d) masih lemahnya monitoring dan evaluasi bagi kegiatan-kegiatan kerjasama Internasional.
4. Pengelola program kerjasama internasional dan pengembangan kapasitas para pemangku kebijakan di bidang kerjasama internasional di berbagai kampus di PTKIN tampak masih belum padu dan sama pandangannya terkait tahapan-tahapan, fokus serta langkah-langkah strategis dalam

melakukan kerjasama internasional. Misalnya, kerjasama internasional selama ini lebih identik sebagai pendatanganan MoU. Padahal kerjasama internasional bukanlah sekedar penandatanganan MoU semata, melainkan harus dilanjutkan dan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan nyata yang dilakukan dengan mitra kerjasama.

5. Naskah-naskah kerjasama internasional kampus-kampus PTKIN yang diteliti sudah cukup banyak namun sepertinya belum semua terdata dan tersimpan dengan baik. Naskah-naskah itupun belum terkoordinasi dan terhubung dengan baik dengan para pemangku kepentingan di kementerian agama RI ataupun di dalam internal PTKIN sendiri. Hal ini dapat menjadi faktor lain yang menghambat kerjasama internasional di PTKIN. Hal seperti ini seringkali menghambat koordinasi, baik antar kampus di dalam internal lingkungan PTKIN maupun dengan Kementerian Agama RI.

Rekomendasi

Berdasarkan beberapa poin dalam kesimpulan di atas, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa poin di bawah ini:

1. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenag RI, diharapkan memberikan dukungan regulasi dan payung hukum yang lebih kuat bagi program kerjasama internasional di berbagai bidang. Dalam konteks Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Kemenag RI, perlu segera memberikan kepastian hukum pengelolaan dan penyelenggaraan kerjasama internasional di kampus-kampus dengan menerbitkan revisi UU kerjasama internasional dalam rangka mendorong akselerasi dan internasionalisasi yang matang pendidikan tinggi di bawah PTKIN.
2. Kampus-kampus UIN di bawah PTKIN didorong untuk meminimalisir atau bahkan menyelesaikan berbagai faktor yang dianggap menghambat dalam kerjasama internasional di perguruan tinggi, dengan cara: menafsirkan regulasi dan kebijakan dengan cermat, membuat rancangan program dan perencanaan kegiatan yang lebih matang, meanggarkan pendanaan yang lebih sesuai dan memadai, menyelaraskan harmonisasi dan koordinasi antar lembaga secara internal dan eksternal, serta membangun pelan-pelan support system yang lebih kondusif bagi terciptanya suasana dan kondisi kerjasama internasional di kampus-kampus PTKIN. Dan terakhir, perlunya memasukkan unsur monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kerjasama Internasional di dalam kampus.
3. Penting sekali memadukan dan menyamakan pandangan konsep kerjasama internasional yang baik di antara para pengelola program kerjasama internasional dan pengembangan kapasitas para pemangku kebijakan di bidang kerjasama internasional di berbagai kampus di PTKIN lewat program lokakarya, seminar dan konferensi sehingga memberikan

gambaran yang baik dan utuh terkait tahapan-tahapan, fokus serta langkah-langkah strategis dalam melakukan kerjasama internasional.

4. Perlunya PTKIN didorong untuk membuat database yang lengkap dan membangun sistem manajemen pengetahuan (knowledge management) sehingga naskah-naskah kerjasama internasional kampus-kampus PTKIN yang sudah banyak dapat terdata dan tersimpan dengan baik. Dengan begitu, naskah-naskah itu dapat terhubung dengan baik dengan para pemangku kepentingan di kementerian agama RI ataupun di dalam internal PTKIN sendiri guna memudahkan tahapan-tahapan penting dalam kerjasama internasional.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Abidin, Hamid. *Kajian Diagnostik Pemetaan Lembaga Filantropi Pendukung Riset*. Jakarta: KSI, 2017.
- Bagaskara, Annaas Maulana. *Kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT Dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking di Indonesia*. *Jurnal of International Relations*, Volume 4 No. 3, 2018.
- Dewantara, Ki Hadjar. *Pendidikan*. Cetakan ketiga. Yogyakarta: Majelis Luhur Perguruan Tamansiswa, 2004.
- Dhofier, Zamakhsyari, dan Sukardi, Ismail (editor). *Pendidikan Tinggi Islam dalam Sorotan: Pengembangan PTAI di Tengah Peluang dan Tantangan Global*. Palembang: PPIS IAIN Raden Fatah, 2007.
- Harini, Setyasih dan Christy Damayanti. *Kerjasama Indonesia-Jepang Dalam Meningkatkan Keterampilan TKI (Studi Kasus Pelatihan Bahasa Dalam Program Magang di Technopark Ganesha Sukowati Sragen)*. *Jurnal Eksplorasi*, Volume XXVII, No. 2, Februari 2015.
- Injaya, Starlet Rallysa *Kerjasama Internasional Indonesia dan Jepang: Peran Jepang Terhadap Isu Deforestasi di Indonesia Dalam Skema Asia Forest Partnership (AFP) Periode 2008-2011*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
- Junus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: Hilda Karya, 1997.
- Kompas. "ITB: 'World Class University' Bukan Tujuan Utama!" *Kompas*. Jakarta: 27 Oktober, 2009.
- Levin, Henry M., Jeong, Dong Wook, & Ou, Dongsu. *What is World Class University?* Paper for The Conference Of The Comparative and International Education Society, Honolulu, Hawaii, March, 16, 2006.
- Lukens-Bull, Ronald A. *Islamic Higher Education in Indonesia: Contibuityand Conflict*. UK: Palgrave Macmilan, 2013.
- Margono. *Aktor Non-Negara Dalam Hubungan Internasional*. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 28, No. 2, Agustus 2015.
- Nayono, Satoti E. *Kerjasama Internasional Perguruan Tinggi: Pengalaman di Universitas Negeri Yogyakarta dalam Workshop Inisiasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Asing ISI*. Yogyakarta, 2012.
- Nulhaqim, Soni Akhmad dkk. *Peranan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia Untuk Menghadapi ASEAN Community 2015 (Studi Kasus: Universitas Indonesia, Universitas*

Padjadjaran, Insititut Teknologi Bandung. Social Work Jurnal, Vol. 6 No. 2.

Rondonuwu, Vionita dkk. *Kerjasama Indonesia Dengan Australia Dalam Meningkatkan Pendidikan di Indonesia*. Laporan Akhir Penelitian, Universitas Sam Ratulangi.

Smith, Michael and Brian Hocking. *World Politics: An Introducing TO International Relations*. Harvester Wheatsirf, 1990

Stavins. *International Cooperation: Agreements and Instruments*. The Symposium IPCC-AR5-WG III. Tokyo: METI, 2011.

Suradijono, Sri Hartatai dkk. *Kajian Diagnostik Mengatasi Hambatan Penelitian di Universitas: Studi Kasus Empat Universitas di Indonesia*. Jakarta: KSI, 2017. Suryadi, Agita. *Kepentingan Indonesia Menyepakati Kerjasama Ekonomi Dengan Slovakia Dalam Bidang Energi dan Infrastruktur*. Jurnal JOM Fisip, Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.

Syafrudin, Didin dkk. *Kajian Diagnostik Mengatasi Hambatan Penelitian di Universitas: Studi Kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2017.

Zulkifli. *Kerjasama Internasional sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)*. Tesis, Universitas Indonesia, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Website

<https://ex.kemlu.go.id/kebijakan/Pages/Kerjasama-Bilateral.aspx> diakses pada 22 Agustus 2020 Pada Pukul 10.00 WIB.

https://kemlu.go.id/portal/id/list/halaman_list_lainnya/95/g-15 diakses pada 22 Agustus 2020 Pada Pukul 10.30 WIB